



LAKIIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
TAHUN 2020



Jl Dewi Sartika No. 118 Telp. (0231) 325429, 321197, 321198
Pesawat 317 S U M B E R

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUAPTEN CIREBON**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2020 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government),

Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program /kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pada Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2020. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2020 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2020 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya penyusunan.

Sumber, 10 Februari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620209 199003 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020, merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, yang pelaksanaan program kegiatannya dilaksanakan selama 12 bulan, sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini suatu realisasi pelaksanaan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur dalam rangka penyelenggaraan “good governance”. Pada dasarnya, bahwa kinerja Dinas merupakan suatu action plan dalam rangka merealisasikan visi Dinas yang telah ditetapkan.

Dalam menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cirebon, telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan sektor Perhubungan berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis yang dalam hal ini telah dirumuskan berbentuk Rencana Strategis (Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon (2020 – 2024) dengan Tujuan Pembangunan Perhubungan Kabupaten Cirebon dengan Program-program yang mendukung kinerja dalam jangka 5 (Lima) tahun (2020 – 2024), pada tahun 2020 program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan :

1. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas dengan Indikator Kinerja Sasaran Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio).
2. Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji.
3. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai dengan Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan :

NON URUSAN :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Indikator Kinerja Program Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Indikator Kinerja Program Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Indikator Kinerja Program Persentase Pemenuhan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Kinerja Program Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor dengan Indikator Kinerja Program Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja.

URUSAN PERHUBUNGAN :

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan Indikator Kinerja Program Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan Indikator Kinerja Program Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan Indikator Kinerja Program Prosentase pelanggaran lalu lintas
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan Indikator Kinerja Program Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Halte dan Terminal) yang layak fungsi
10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan Indikator Kinerja Program Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan Indikator Kinerja Program Peningkatan Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 telah tercapai. dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja	Rasio (%)	Ket.
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8
1	01.01.01	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	16.113.838.000	10.897.516.609	67.63	
		(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio) (Non Kumulatif)	0.75 V/C	0.75 VC	100	Puncak volume tertinggi di Jln. Tuparev sebesar 2506,47 smp/jam. Dengan kapasitas 3341,96. Sehingga V/C = $2506,47/3341,96 = 0,75$.
2	01.01.02	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	2.221.145.400	2.138.826.040	96.29.00	
		(IKK/IKU)- Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji (Non Kumulatif)	82.89 Prosen	153.9% (1x) atau 76% (2x uji)	153.9% (1x) atau 76% (2x uji)	jumlah kendaraan laik fungsi dibagi total jumlahkendaraan wajib uji X 100 = $24.555 (/30 \text{ des}) /15946 \times 100$ (Wajib uji 15.946 itu hanya menghitung jumlah kendaraan wajib uji seharusnya dikalikan 2 x = 31.892.
3	01.01.03	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	35.687.935.500	32.101.821.745	89.95	
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan (Non Kumulatif)	100 Prosen	100%	100	Target IKM Tahun 2020 / Hasil Survey IKM Tahun 2020 x 100 ($55/74,36 \times 100 =135,2$)

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 telah tercapai. Dari 3 indikator sasaran dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kesatu

“Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas”

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.113.838.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.897.516.609,- atau 68% dengan target kinerja sasaran sebesar 0,75 V/C. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah merealisasikan target kinerja 0,75 V/C dengan melaksanakan Survey LHR dengan rumus Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio) di Puncak volume tertinggi di Jln. Tuparev Kabupaten Cirebon sebesar 2506,47 smp/jam. Dengan kapasitas 3341,96. Sehingga $V/C = 2506,47/3341,96 = 0,75$ V/C. Sehingga mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%

2. Sasaran Kedua

“ Meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan”.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.221.145.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.138.826.040,- atau 96% dengan target kinerja 82,89%. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah merealisasikan target sebesar 153,9% dari realisasi wajib uji 24.555 dibagi 15.946 wajib uji di kali 100. Sehingga Dinas perhubungan telah mencapai target sebanyak 153,9 % (dalam 1x Uji) dan 76% (dalam 2x Uji)

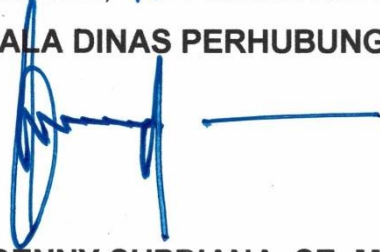
3. Sasaran Ketiga

“ Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai ”.

Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun 2020 sebesar 55 point. Dinas Perhubungan telah melakukan Survey IKM di Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor pada 19

November sampai dengan 23 November 2020 kepada 100 responden dan menghasilkan angka indeks sebesar 74,36 point. Sehingga pencapaian target 135% melebihi target Renstra di Tahun 2020.

Demikian yang dapat Kami sampaikan dalam ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2020, Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terimakasih.

Sumber, 10 Februari 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Ringkasan eksekutif	ii
Daftar isi	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Unit Kerja	1
B. Setruktur Organisasi	2
C. Tugas Pokok Dan Fungsi	2
D. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh	20
E. Sistematika Penulisan	20
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
A. Visi Dan Misi	22
B. Tujuan	24
C. Sasaran Kinerja	25
D. Indikator Kinerja Utama (Iku)	27
E. Penetapan/Rencana Kinerja Tahun 2020	28
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja	30
B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja	31
C. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran	32
PENUTUP	52
<u>Lampiran :</u>	
1. IKU Perubahan Tahun 2020	
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020	
3. LRA Tahun 2020	
4. SPJ Fungsional Tahun 2020	
5. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2020	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA

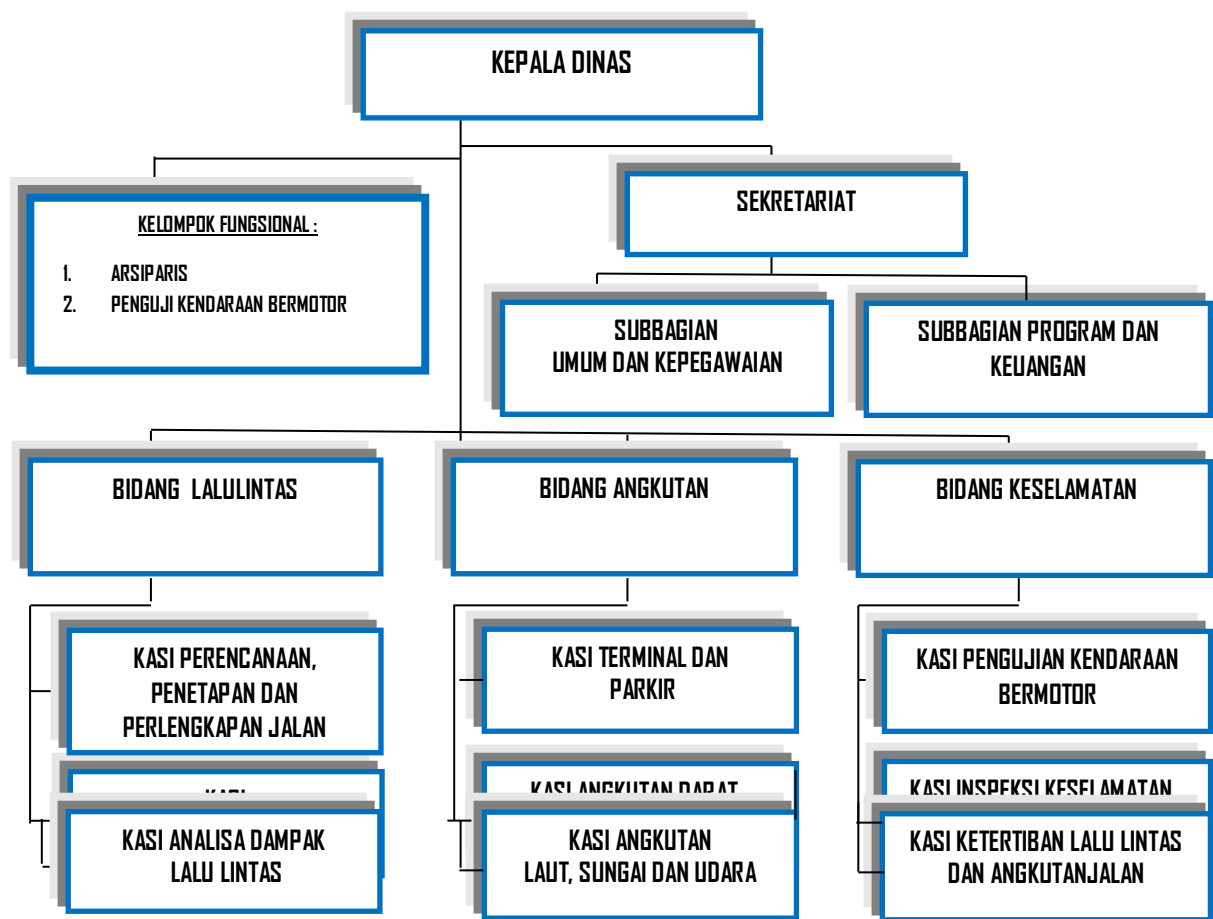
Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan serta berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah mencakup pelayanan yang menghasilkan public good seperti jalan dan lain lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lain-lain.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi pengelolaan keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. SETRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2016, Seri. D6 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2016, Seri. D6 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah :

1. TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL
1.

Setiap jabatan struktural pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas umum;
2.

Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup dinas/ sekretariat/ bidang/ subbagian/ seksi/ UPT/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

memimpin dan pertanggungjawaban kegiatan;

b.

merencanakan kegiatan dan anggaran;

- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan
- h. program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
- i. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- j. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
- k. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

A. KEPALA DINAS

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan;
 - b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perhubungan, komunikasi dan pengolahan data elektronik;
 - c. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perhubungan, komunikasi dan pengolahan data elektronik sesuai aturan yang berlaku;
 - d. perencanaan dan pengendalian anggaran
 - e. pengendalian urusan administrasi Dinas;
 - f. pengendalian bidang urusan lalu lintas, angkutan, terminal, perparkiran sesuai dengan lingkup tugas;
 - g. pengendalian bidang urusan telekomunikasi dan desiminasi informasi, serta pengolahan data elektronik

- sesuai dengan lingkup tugas;
- h. pengendalian Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan lingkup tugas;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang lalu lintas, angkutan dan
 - j. keselamatan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
 - k. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang urusan perpajakan dan pengendalian, telekomunikasi dan desiminasi informasi, pengolahan data elektronik serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan lingkup tugas;
 - l. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan
- kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan,
- mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan.

B. SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang

- meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
 - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama
 - g. dan hubungan masyarakat;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
 - i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 3. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

C. Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
 - e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas;
 - g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;

- h. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - j. penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - k. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - l. pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - m pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan . tugas;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

D. Subbagian Program dan Keuangan

1. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran dinas;

- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - h. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - i. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - j. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas
 - k. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

E. BIDANG LALU LINTAS

1. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan bidang lalu lintas;
 - c. penyusunan pedoman teknis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengelolaan bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, dan kebutuhan lalu lintas;
 - e. pengkajian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - f. pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;

- g. pengendalian analisa dampak lalu lintas;
 - h. pengendalian daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;
dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu Lintas (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 3. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan, Penerangan Jalan Umum dan Analisa Dampak Lalu Lintas

F. Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan

1. Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor disesuaikan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah diterbitkan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana lalu lintas;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Lalu Lintas;
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 3. Kepala Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan pembinaan perencanaan, penetapan dan perlengkapan jalan.

G. Seksi Penerangan Jalan Umum

1. Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penerangan Jalan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang berada di jalan dan di bahu jalan;
 - c. penyiapan ijin/rekomendasi untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan dipasang secara swadaya oleh masyarakat;
 - d. pelaksanaan penertiban umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin/rekomendasi dari Dinas;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penerangan jalan umum yang tidak memiliki izin/rekomendasi dari Dinas;
 - f. pelaksanaan koordinasi pengendalian dan pengawasan dalam rangka pemasangan penerangan jalan umum dan

- jenis penerangan lainnya dengan satuan kerja terkait;
- g. penyiapan bahan-bahan kebutuhan kegiatan operasional penerangan jalan umum yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengelolaan dan prosedur pemasangan penerangan jalan umum;
 - i. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penggunaan penerangan jalan umum;
 - j. pelaksanaan investigasi lapangan terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penerangan jalan umum;
 - k. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - 3. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melakukan merencanakan, mengelola, memantau, pengoperasian penerangan jalan umum.

H. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas

- 1. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan informasi dampak lalu lintas;
 - c. pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu lintas;
 - d. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - e. pelaksanaan teknis perencanaan umum pembangunan

- jaringan transportasi jalan;
 - f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 3. Kepala Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melakukan menyusun rencana, mengolah data, dan menganalisis dampak lalu lintas.

I. BIDANG ANGKUTAN

1. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan bidang angkutan;
 - c. penyusunan pedoman teknis penarikan dan penyetoran retribusi terminal dan parkir;
 - d. pengkajian data pengesahan rancang bangun terminal penumpang dan terminal barang;
 - e. pengendalian pengoperasian terminal penumpang dan terminal barang;
 - f. pengkajian penetapan lokasi terminal penumpang dan terminal barang;
 - g. pengendalian sarana prasarana terminal;
 - h. pengkajian permohonan ijin usaha angkutan;
 - j. pengendalian pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum;
 - k. pengkajian penetapan tarif angkutan;
 - l. pengendalian jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan Bidang; dan

- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang Angkutan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi bidang Terminal dan Parkir, Angkutan Darat, Angkutan Sungai, Laut dan Udara.

J. Seksi Terminal dan Parkir

1. Seksi Terminal dan Parkir mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan lokasi serta pengoperasian terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang; pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya penerimaan retribusi terminal, serta administrasi retribusi;
 - c. pengolahan data pengesahan rancang bangun terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - d. pengelolaan terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - e. pengelolaan sarana prasarana terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - f. pengelolaan retribusi terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - g. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan Bidang Perparkiran dan Pengendalian;
 - h. pembinaan penyusunan pedoman teknis penarikan dan penyetoran retribusi parkir;
 - i. pengkajian permohonan ijin pembangunan fasilitas parkir untuk umum di jalan Daerah;
 - j. pengawasan teknis pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
 - k. pembinaan teknis perparkiran operasional lalu lintas;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Seksi Terminal dan Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Terminal dan Parkir (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 3. Kepala Seksi Terminal dan Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan merencanakan, mengelola, memantau, pengoperasian terminal, dan mengevaluasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana terminal dan teknis operasional perparkiran.

K. Seksi Angkutan Darat

- 1. Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus;
 - c. pengolahan rekomendasi dan perpanjangan ijin usaha angkutan dan ijin trayek;
 - d. pengawasan pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum;
 - e. pengelolaan retribusi tarif angkutan;
 - f. pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Seksi Angkutan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Angkutan Darat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 3. Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi jaringan lalu lintas angkutan orang, angkutan barang, dan angkutan khusus.

L. Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara

1. Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dan konsultasi dengan pemerintahan provinsi dan pusat di bidang angkutan laut;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, mengolah data angkutan sungai, laut dan udara;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan laut;
 - f. pelaksanaan upaya pemecahan teknis terhadap keberadaan dan fungsi angkutan laut;
 - g. pelaksanaan pemberian perizinan usaha penunjang angkutan laut;
 - h. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan antar pulau;
 - i. pelaksanaan penetapan DLKR/ DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional;
 - j. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastruktur penunjangnya;
 - k. pelaksanaan pengumpulan dan pendaftaran kapal berukuran isi kotor tidak lebih dari GT 7;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Angkutan Laut dengan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Angkutan, sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Kepala Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi jaringan lalu lintas angkutan sungai, laut dan udara.

M. BIDANG KESELAMATAN

1. Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Keselamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pengelolaan pemberian perizinan pendidikan mengemudi;
 - c. pengelolaan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pengujian kendaraan;
 - d. pengelolaan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan perbengkelan dan karoseri;
 - e. penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan;
 - f. penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian perbengkelan dan karoseri kendaraan;
 - g. pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Keselamatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang Keselamatan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Bidang Keselamatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, memfasilitasi, dan membina teknis keselamatan lalu lintas.

N. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagai pedoman pelaksanaan

- tugas;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan mensahkan hasil uji dan pengendalian serta pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaraan tidak bermotor;
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian berkala yang diselenggarakan oleh swasta;
 - e. pelaksanaan akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh swasta;
 - f. pelaksanaan penilaian teknis kendaraan bermotor;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait berkenaan dengan pelaksanaan bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian;
 - i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam kegiatan Seksi Pengujian;
 - j. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 3. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi pengujian kendaraan bermotor.

O. Seksi Inspeksi Keselamatan

1. Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

- b. pendataan dan pemetaan data informasi kejadian dan daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - c. pembinaan teknis keselamatan lalu lintas;
 - d. pelaksanaan manajemen dampak lalu lintas;
 - e. pelaksanaan pengadaan kebutuhan manajemen lalu lintas;
 - f. pelaksanaan fasilitasi penanggulangan daerah rawan kecelakaan dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Inspeksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Inspeksi Keselamatan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 3. Kepala Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, memfasilitasi, dan membina teknis keselamatan lalu lintas.

P. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketertiban Lalu Lintas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan penertiban lalu lintas;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan surat-surat perizinan kendaraan umum baik kendaraan barang maupun penumpang yang berupa kelengkapan buku KIR, Surat Izin Bongkar Muat dan Trayek (Kartu Pengawasan);
 - e. pelaksanaan penilangan terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas dan peraturan daerah

- kabupaten cirebon dengan mengeluarkan berita acara penilangan;
- f. pelaksanaan koodinasi dengan Satuan Kerja terkait dalam rangka pengamanan berkendara terhadap para Pejabat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
 - g. pelaksanaan pengawalan para Pejabat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
 - h. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
 - i. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi;
 - j. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Ketertiban Lalu Lintas;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Ketertiban Lalu Lintas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Laut dan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, laut dan udara.

2. TATA KERJA

A. Umum

- 1. Hal-hal yang menjadi tugas dan urusan dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.

2. Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksanaan tugas pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi serta kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
4. Kepala dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

B. PELAPORAN

1. Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. HAL MEWAKILI

1. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris;
2. Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dan tugas pokoknya dan atau berdasarkan senioritas.

D. KEPEGAWAIAN

1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

3. KETENTUAN LAIN

1. Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
2. Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umum, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang (Bidang Angkutan, Bidang Lalu Lintas dan Bidang Keselamatan).

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, salah satu aspek strategis kewenangan tugas Dinas Perhubungan dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas dari kepolisian.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan, untuk selalu menempatkan posisi organisasi pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu menanggapi tuntutan lingkungan. Sehingga didalam perkembangan selanjutnya organisasi akan selalu tanggap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang merupakan komponen RENSTRA perlu dirumuskan bersama untuk dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA

- B. SETRUKTUR ORGANISASI
- C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH
- E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. VISI DAN MISI
- B. TUJUAN
- C. SASARAN KINERJA
- D. IKU
- E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
- B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA
 - Ringkasan Kinerja
 - Rincian Kinerja
- C. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN

PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

A.1 VISI

Visi Bupati Cirebon :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN ”.**

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan Visi sebagai berikut :

***“ Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Selamat, Tertib,
Lancar dan Terpadu guna meningkatkan perekonomian
masyarakat “***

Definisi :

Selamat : *Terkandung makna bahwa dinas perhubungan sebagai dinas teknis yang menangani masalah perhubungan harus dapat memberikan pelayanan yang baik, terhadap transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat agar terhindar dari kecelakaan (terdapat didalam kegiatan pengujian kendaraan umum yang laik jalan).*

Tertib : *Terkandung makna sebagai dinas teknis yang memiliki kewenangan mengatur lalu lintas, berkewajiban untuk mengatur lalu lintas dalam bentuk pemenuhan rambu-rambu lalu lintas.*

Lancar : *Memiliki makna semua kegiatan transportasi dapat berjalan tanpa adanya hambatan atau terhindar dari macet.*

Terpadu : *Dimana kegiatan transportasi berjalan secara sinergi.*

A.2 MISI

Misi Bupati Cirebon :

“ Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mempunyai misi, yaitu :

- 1 Mewujudkan ketersediaan sarana dan Fasilitas perhubungan yang humanis ,memadai dan sesuai standar di Kabupaten Cirebon.
- 2 Mewujudkan pelayanan Perhubungan menuju keselamatan lalu lintas.

Untuk dapat merealisasikan misi yang telah ditetapkan, organisasi harus berinteraksi dengan lingkungannya,tanpa interaksi yang baik terhadap lingkungannya, organisasi akan menghadapi banyak tantangan dalam pencapaian visi dan misinya.

Selain itu perlu dirumuskan *Critical Success Factors* (Faktor – faktor penentu keberhasilan) untuk mencapai sukses di masa mendatang dengan menggali potensi dari dalam Organisasi sendiri.

Adapun faktor – faktor penentu keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon meliputi :

- 1 Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mewujudkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD, dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional, baik aparat pelaksana terkait maupun mitra kerja.
- 2 Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mewujudkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD, dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional, baik aparat pelaksana terkait maupun mitra kerja.
- 3 Mengoptimalkan fungsi kelembagaan baik struktural maupun fungsional, untuk menerapkan prinsip – prinsip koordinasi,intregasi,sinkronisasi dan simplifikasi.

C. TUJUAN

Tujuan Bupati Kabupaten Cirebon :

“ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang beradil dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan “.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon :

“ Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan “.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon adalah Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan dengan tolak ukur Menurunkan Angka Kecelakaan sehingga adanya peningkatan infrastruktur dasar kabupaten yang berkualitas untuk menurunkan tingkat Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum.

Tujuan merupakan target kualitas organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi. Tujuan dimaksud untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang yaitu lebih dari satu tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Dengan pernyataan tujuan, organisasi semakin jelas menentukan arah mana yang akan dituju dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan bersifat lebih nyata dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dilihat dari sudut pandang management strategic, alasan utama keberadaan utama suatu organisasi adalah untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan organisasi tersebut dalam kondisi lingkungan selalu berubah secara cepat.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut, organisasi dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, terutama kemampuan untuk berkompetisi. Kemampuan berkompetisi akan tumbuh dalam tubuh organisasi apabila terdapat rumusan tentang tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor keberhasilan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut

1. Tercapainya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka keselamatan berlalu lintas.
2. Tercapainya sarana angkutan yang memadai dan

selamat serta mampu mendukung peningkatan akselerasi pergerakan orang, barang, kesadaran, kepatuhan dan budaya keselamatan berlalu lintas.

3. Tercapainya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan.

D. **SASARAN**

Sasaran Bupati Cirebon :

- 1. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah
- 2. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik
- 3. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

Sasaran Dinas Perhubungan :

- 1. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
- 2. Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan
- 3. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai

Sasaran – sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang dirumuskan untuk masing – masing tujuan, beserta indikator kinerja bagi setiap sasaran pada tahun 2020 menjadi tolok ukur untuk Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas, Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan ,Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan guna untuk menurunkan jumlah kecelakaan, meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menunjang kelancaran kegiatan dinas.

E. **INDIKATOR KINERJA**

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)
2.	Meningkatnya kendaraan yang	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji

	berkeselamatan	
3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NON URUSAN		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Disiplin Aparatur
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja
5.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja
URUSAN PERHUBUNGAN		
6.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)
7.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak
8.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase pelanggaran lalu lintas
9.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Halte dan Terminal) yang layak fungsi
10.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik
11.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Peningkatan Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji

A.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon didapat dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, IKK dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala SKPD Kabupaten Cirebon dan Bupati Cirebon. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020, adalah :



**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020**

- 1. Unit Organisasi : **DINAS PERHUBUNGAN**
- 2. Bidang Urusan : **Urusan Perhubungan**
- 3. Tugas Pokok :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
 - Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan.
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan.
 - Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas.
 - Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Dinas Perhubungan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

1. Sasaran Strategis Perubahan Renstra :

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan Sebelum Perubahan	Anggaran Target Satuan Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	1.1.1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	26.658.044.800	15.863.838.000
		(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.75 V/C	0.75 V/C
2	1.1.2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	3.385.728.000	2.471.145.400
		(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	82.89 Prosen	82.89 Prosen
3	1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	35.921.620.200	35.687.935.500
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	100 Prosen	100 Prosen
JUMLAH TOTAL ANGGARAN			65.965.393.000	54.022.918.900

D. RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN TAHUN 2020

RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGIS													
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas													
INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(IKK/IKU) Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.76 VC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75 VC

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS													
Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan													
INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(IKK/IKU) Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	82.77 %	82.78	82.79	82.80	82.81	82.82	82.83	82.84	82.85	82.86	82.87	82.88	82.89

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai

INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	100%	7	15	23	31	39	47	57	67	76	84	92	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2020

Target, realisasi, Indikator Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 adalah ;

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
 SKPD (IKK/IKU) DINAS PERHUBUNGAN
 Periode: Sampai dengan bulan Desember 2020

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja	Rasio (%)	Ket.
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8
1	01.01.01	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	16.113.838.000	10.897.516.609	67.63	
		(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio) (Non Kumulatif)	0.75 V/C	0.75 VC	100	Puncak volume tertinggi di Jln. Tuparev sebesar 2506,47 smp/jam. Dengan kapasitas 3341,96. Sehingga V/C = 2506,47/3341,96 = 0,75.
2	01.01.02	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	2.221.145.400	2.138.826.040	96.29.00	
		(IKK/IKU)- Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji (Non Kumulatif)	82.89 Prosen	153.9% (1x) atau 76% (2x uji)	153.9% (1x) atau 76% (2x uji)	jumlah kendaraan laik fungsi dibagi total jumlahkendaraan wajib uji X 100 =24.555 (/30 des) /15946 X100 (Wajib uji 15.946 itu hanya menghitung jumlah kendaraan wajib uji seharusnya dikalikan 2 x = 31.892.
3	01.01.03	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang	35.687.935.500	32.101.821.745	89.95	

		memadai				
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan (Non Kumulatif)	100 Prosen	100%	100	Target IKM Tahun 2020 / Hasil Survey IKM Tahun 2020 x 100 (55/74,36 x 100 =135,2)

B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 telah tercapai. Dari 3 indikator sasaran dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kesatu

“Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas”

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.113.838.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.897.516.609,- atau 68% dengan target kinerja sasaran sebesar 0,75 V/C. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah merealisasikan target kinerja 0,75 V/C dengan melaksanakan Survey LHR dengan rumus Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio) di Puncak volume tertinggi di Jln. Tuparev Kabupaten Cirebon sebesar 2506,47 smp/jam. Dengan kapasitas 3341,96. Sehingga $V/C = 2506,47/3341,96 = 0,75$ V/C. Sehingga mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%

2. Sasaran Kedua

“ Meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan”.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.221.145.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.138.826.040,- atau 96% dengan target kinerja 82,89%. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah merealisasikan target sebesar 153,9% dari realisasi wajib uji 24.555 dibagi 15.946 wajib uji di kali 100. Sehingga Dinas perhubungan telah mencapai target sebanyak 153,9 % (dalam 1x Uji) dan 76% (dalam 2x Uji)

3. Sasaran Ketiga

“ Meningkatkan Pelayanan Perkantoran yang memadai ”.

Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun 2020 sebesar 55

point. Dinas Perhubungan telah melakukan Survey IKM di Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor pada 19 November sampai dengan 23 November 2020 kepada 100 responden dan menghasilkan angka indeks sebesar 74,36 point. Sehingga pencapaian target 135% melebihi target Renstra di Tahun 2020.

C. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN

Dinas Perhubungan melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Urusan Perhubungan.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 11 (Sebelas) Program dan 43 (Empat Puluh Tiga) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.54.022.918.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.138.164.394,- sisa sebesar Rp. 8.884.754.506,- atau tercapai sebesar 83,55 %,

Sementara Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 6 (Enam) Program dan 22 (Dua Puluh Dua) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 18.334.983.400,- dan terealisasi sebesar Rp. **13.036.342.649,-** sisa sebesar Rp. **5.298.640.751,-** atau tercapai sebesar 71 %.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Dinas Perhubungan terinci sebagai berikut :

Belanja Urusan, Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI *) (Rp)	SISA (Rp)	PERS EN (%)
	BELANJA	Rp 54.022.918.900	Rp 45.138.164.394	Rp 8.884.754.506	84%
	BELANJA LANGSUNG	Rp 54.022.918.900	Rp 45.138.164.394	Rp 8.884.754.506	84%
	BELANJA NON URUSAN	Rp 35.687.935.500	Rp 32.101.821.745	Rp 3.586.113.755	90%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 34.823.146.100	Rp 31.250.530.145	Rp 3.572.615.955	90%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 33.499.998.000	Rp 30.158.917.518	Rp 3.341.080.482	90%
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Rp 50.000.000	Rp 14.271.000	Rp 35.729.000	29%

	Perizinan Kendaraan				
3.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 21.137.500	Rp 21.137.500	Rp -	100%
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 79.044.300	Rp 78.887.150	Rp 157.150	100%
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 793.949.500	Rp 612.401.000	Rp 181.548.500	77%
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Rp 14.992.900	Rp 14.992.900	Rp -	100%
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 120.075.900	Rp 117.892.100	Rp 2.183.800	98%
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 14.762.000	Rp 14.012.000	Rp 750.000	95%
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 120.000.000	Rp 109.633.975	Rp 10.366.025	91%
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 20.900.000	Rp 20.100.000	Rp 800.000	96%
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 88.286.000	Rp 88.285.002	Rp 998	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur	Rp 418.777.600	Rp 411.766.850	Rp 7.010.750	98%
12	Pembangunan Gedung Kantor	Rp 50.000.000	Rp 49.090.000	Rp 910.000	98%
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp 228.577.600	Rp 225.276.850	Rp 3.300.750	99%
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 90.200.000	Rp 88.700.000	Rp 1.500.000	98%
15	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rp 50.000.000	Rp 48.700.000	Rp 1.300.000	97%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 180.000.000	Rp 177.960.000	Rp 2.040.000	99%
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Rp 180.000.000	Rp 177.960.000	Rp 2.040.000	99%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 186.392.800	Rp 183.776.050	Rp 2.616.750	99%
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 30.488.000	Rp 30.488.000	Rp -	100%
18	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	100%
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Rp 50.110.000	Rp 48.591.700	Rp 1.518.300	97%

	Akhir Tahun				
20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 90.794.800	Rp 89.696.350	Rp 1.098.450	99%
5.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Rp 79.619.000	Rp 77.788.700	Rp 1.830.300	98%
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	Rp 79.619.000	Rp 77.788.700	Rp 1.830.300	98%
	Jumlah Belanja	Rp 35.687.935.500	Rp 32.101.821.745	Rp 3.586.113.755	90%
	BELANJA URUSAN PERHUBUNGAN	Rp 18.334.983.400	Rp 13.036.342.649	Rp 5.298.640.751	71%
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 1.663.063.200	Rp 1.563.877.900	Rp 99.185.300	94%
22	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Rp 419.373.200	Rp 416.071.050	Rp 3.302.150	99%
23	Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Rp 448.096.000	Rp 438.018.150	Rp 10.077.850	98%
24	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Rp 49.992.300	Rp 23.494.700	Rp 26.497.600	47%
25	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Rp 370.684.000	Rp 354.184.450	Rp 16.499.550	96%
26	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Rp 196.791.200	Rp 195.349.200	Rp 1.442.000	99%
27	Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisis dampak Lalu Lintas	Rp 128.126.500	Rp 87.510.350	Rp 40.616.150	68%
28	Sosialisasi dan pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas	Rp 50.000.000	Rp 49.250.000	Rp 750.000	99%
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 539.560.000	Rp 512.339.300	Rp 27.220.700	95%
29	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 99.980.000	Rp 99.140.000	Rp 840.000	99%
30	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 439.580.000	Rp 413.199.300	Rp 26.380.700	94%
8	Program Peningkatan	Rp 758.044.600	Rp 733.906.950	Rp 24.137.650	97%

	Pelayanan Angkutan				
31	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Rp 115.413.000	Rp 114.680.700	Rp 732.300	99%
32	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut)	Rp 85.093.600	Rp 83.663.600	Rp 1.430.000	98%
33	Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas	Rp 530.000.000	Rp 510.604.650	Rp 19.395.350	96%
34	Koordinasi penanganan keselamatan transportasi	Rp 25.738.000	Rp 23.158.000	Rp 2.580.000	90%
35	Penyusunan data base kecelakaan lalu lintas	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp -	100%
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp 250.000.000	Rp 247.942.593	Rp 2.057.407	99%
36	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Rp 250.000.000	Rp 247.942.593	Rp 2.057.407	99%
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 14.200.774.800	Rp 9.085.696.116	Rp 5.115.078.684	64%
37	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rp 706.709.800	Rp 636.288.170	Rp 70.421.630	90%
38	Pengadaan Marka Jalan	Rp 510.000.000	Rp 495.571.000	Rp 14.429.000	97%
39	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Rp 267.300.000	Rp 194.101.195	Rp 73.198.805	73%
40	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rp 12.716.765.000	Rp 7.759.735.751	Rp 4.957.029.249	61%
11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp 923.540.800	Rp 892.579.790	Rp 30.961.010	97%
41	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Rp 225.000.000	Rp 217.027.790	Rp 7.972.210	96%
42	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Rp 449.970.000	Rp 430.695.000	Rp 19.275.000	96%
43	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Rp 248.570.800	Rp 244.857.000	Rp 3.713.800	99%
	Jumlah Belanja	Rp 18.334.983.400	Rp 13.036.342.649	Rp 5.298.640.751	71%
	JUMLAH TOTAL URUSAN DAN NON URUSAN PERHUBUNGAN	Rp 54.022.918.900	Rp 45.138.164.394	Rp 8.884.754.506	84%

Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2020 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Urusan yang Melekat pada SKPD (Non Urusan)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI *) (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
	BELANJA				
	BELANJA LANGSUNG				
	BELANJA NON URUSAN				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 34.823.146.100	Rp 31.250.530.145	Rp 3.572.615.955	90%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 33.499.998.000	Rp 30.158.917.518	Rp 3.341.080.482	90%
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Rp 50.000.000	Rp 14.271.000	Rp 35.729.000	29%
3.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 21.137.500	Rp 21.137.500	Rp -	100%
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 79.044.300	Rp 78.887.150	Rp 157.150	100%
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 793.949.500	Rp 612.401.000	Rp 181.548.500	77%
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Rp 14.992.900	Rp 14.992.900	Rp -	100%
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 120.075.900	Rp 117.892.100	Rp 2.183.800	98%
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 14.762.000	Rp 14.012.000	Rp 750.000	95%
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 120.000.000	Rp 109.633.975	Rp 10.366.025	91%
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 20.900.000	Rp 20.100.000	Rp 800.000	96%
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 88.286.000	Rp 88.285.002	Rp 998	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur	Rp 418.777.600	Rp 411.766.850	Rp 7.010.750	98%
12	Pembangunan Gedung Kantor	Rp 50.000.000	Rp 49.090.000	Rp 910.000	98%
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp 228.577.600	Rp 225.276.850	Rp 3.300.750	99%
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 90.200.000	Rp 88.700.000	Rp 1.500.000	98%
15	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rp 50.000.000	Rp 48.700.000	Rp 1.300.000	97%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 180.000.000	Rp 177.960.000	Rp 2.040.000	99%
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Rp 180.000.000	Rp 177.960.000	Rp 2.040.000	99%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 186.392.800	Rp 183.776.050	Rp 2.616.750	99%
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 30.488.000	Rp 30.488.000	Rp -	100%
18	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	100%
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 50.110.000	Rp 48.591.700	Rp 1.518.300	97%
20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 90.794.800	Rp 89.696.350	Rp 1.098.450	99%
5.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	Rp 79.619.000	Rp 77.788.700	Rp 1.830.300	98%
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	Rp 79.619.000	Rp 77.788.700	Rp 1.830.300	98%
	Jumlah Belanja	Rp 35.687.935.500	Rp 32.101.821.745	Rp 3.586.113.755	90%
Keterangan : *) SPJ FUNGSIONAL DAN LRA tahun 2020					

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 34.823.146.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.101.821.745,- sisa sebesar Rp. 3.586.113.755,- atau tercapai sebesar 90%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. **Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.499.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.158.917.518,- sisa sebesar Rp. 3.572.615.955,- atau tercapai sebesar 90%.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 4 rekening

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

- b. **Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 50.000.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp 14.271.000,- Sisa sebesar Rp. 35.729.000 atau 29 %.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya jasa perijinan KIR dan STNK sebanyak 61 Kendaraan

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

- c. **Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 21.137.500,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 21.137.500,- atau 100 %.

Output kegiatan adalah Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja.

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

- d. **Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 79.044.300,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 78.887.150,- sisa sebesar Rp. 157.150.- atau 100%.

Output Kegiatan adalah Terpenuhinya alat tulis kantor sebanyak

38 jenis

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

- e. **Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan alokasi anggaran Sebesar Rp. 793.949.500,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 612.401.000,- sisa sebesar Rp. 181.548.500,- atau 77%

Output Kegiatan adalah Terpenuhinya barang cetak dan pengadaan sebanyak 13 Jenis.

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

- f. **Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 14.992.900 ,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 14.992.900,- atau 100%

Output Kegiatan adalah Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan sebanyak 8 Jenis

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

- g. **Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 120.075.900,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 117.892.100,- sisa sebesar Rp. 2.183.800,- atau 98%.

Output Kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

- h. **Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.762.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.012.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 750.000,- atau

sebesar 95%.

Output Kegiatan adalah Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

- i. **Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan** dengan alokasi anggaran Sebesar Rp. 120.000.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 109.633.975,- sisa anggaran sebesar Rp. 10.366.025,-atau 91%.

Output Kegiatan adalah Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

- j. **Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 20.900.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 20.100.000 ,- sisa anggaran Rp. 800.000,-atau 96%

Output Kegiatan adalah Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu dinas

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

- k. **Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 88.286.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 88.285.002,- sisa anggaran sebesar Rp. 998,-atau 100%

Output Kegiatan adalah Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur sebesar Rp. 418.777.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 411.766.850,- sisa anggaran sebesar Rp. 7.010.750 atau tercapai sebesar 98%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.090.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 910.000,- atau 98%

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

Output Kegiatan adalah Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu dinas

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 100%

- b. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 228.577.600,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 225.276.850,- sisa anggaran sebesar Rp. 3.300.750,- atau 99 %.

Output Kegiatan adalah Terpenuhinya **Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor**

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standart kebutuhan pelayanan prima.

- c. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 90.200.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 88.700.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- atau 98%.

Output Kegiatan adalah Terpenuhinya pemeliharaan rutin / kendaraan dinas.

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur yang sesuai standart kebutuhan pelayanan prima.

- d. **Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 50.000.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 48.700.000,- sisa anggaran sebesar RP. 1.300.000,- atau 97 %.

Output Kegiatan adalah Terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standart kebutuhan pelayanan prima.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Alokasi anggaran untuk Progam Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 180.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 177.960.000,- sisa anggaran sebesar Rp.2.040.000,- atau tercapai sebesar 99%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. **Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 180.000.000 ,- dengan Realisasi Sebesar Rp 177.960.000,- sisa anggaran sebesar Rp.2.040.000,- atau 99%.

Output Kegiatan adalah Terpenuhinya pakaian kerja lapangan pegawai

Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Alokasi anggaran untuk Progam **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.** sebesar Rp. 186.392.800 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.776.050,- sisa anggaran sebesar Rp. 2.616.750,- atau tercapai sebesar 99%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar**
- a. **Realisasi Kinerja SKPD**
 dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 30.488.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 30.488.000,- sisa anggaran sebesar RP. 0,- atau 100%.
Output Kegiatan adalah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Outcome kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja
 - b. **Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 15.000.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 15.000.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 0,- atau 100 %.
Output Kegiatan adalah Tersedianya Laporan keuangan semesteran
Outcome kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja
 - c. **Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**
 dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 50.110.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 48.591.700,- sisa anggaran sebesar RP. 1.518.300,- atau 97 %.
Output Kegiatan adalah Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun
Outcome kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja
 - d. **Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 90.794.800,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 89.696.350,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.098.450,- atau 99 %.
Output Kegiatan adalah Terlaksanakannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program dan kegiatan

Outcome kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja

5. **Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.**

Alokasi anggaran untuk Progam **Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral** sebesar Rp. 79.619.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.788.700,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.830.300,- atau tercapai sebesar 98%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. **Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral** dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 79.619.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 77.788.700 ,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.830.300,- atau 98%

Output Kegiatan adalah Tersedianya Dokumen perencanaan sektoral

Outcome kegiatan adalah Penjabaran konsistensi program renstra ke dalam renja

2. **Urusan Wajib Bidang Perhubungan**

1) **Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang merupakan tugas utama dari Dinas Perhubungan. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Perhubungan melaksanakan 6 (Enam) Program dan 22 (Dua Puluh Dua) Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI *) (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
	BELANJA				
	BELANJA LANGSUNG				
	BELANJA URUSAN PERHUBUNGAN				
1.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 1.663.063.200	Rp 1.563.877.900	Rp 99.185.300	94%
1.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Rp 419.373.200	Rp 416.071.050	Rp 3.302.150	99%
2.	Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Rp 448.096.000	Rp 438.018.150	Rp 10.077.850	98%
3.	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Rp 49.992.300	Rp 23.494.700	Rp 26.497.600	47%
4.	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Rp 370.684.000	Rp 354.184.450	Rp 16.499.550	96%
5.	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Rp 196.791.200	Rp 195.349.200	Rp 1.442.000	99%
6.	Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisis dampak Lalu Lintas	Rp 128.126.500	Rp 87.510.350	Rp 40.616.150	68%
7.	Sosialisasi dan pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas	Rp 50.000.000	Rp 49.250.000	Rp 750.000	99%
2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 539.560.000	Rp 512.339.300	Rp 27.220.700	95%
8.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 99.980.000	Rp 99.140.000	Rp 840.000	99%
9.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 439.580.000	Rp 413.199.300	Rp 26.380.700	94%
3.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 758.044.600	Rp 733.906.950	Rp 24.137.650	97%
10.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Rp 115.413.000	Rp 114.680.700	Rp 732.300	99%
11.	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut)	Rp 85.093.600	Rp 83.663.600	Rp 1.430.000	98%
12.	Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas	Rp 530.000.000	Rp 510.604.650	Rp 19.395.350	96%
13.	Koordinasi penanganan keselamatan transportasi	Rp 25.738.000	Rp 23.158.000	Rp 2.580.000	90%
14.	Penyusunan data base kecelakaan lalu lintas	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp -	100%
4.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp 250.000.000	Rp 247.942.593	Rp 2.057.407	99%
15.	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Rp 250.000.000	Rp 247.942.593	Rp 2.057.407	99%
5.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 14.200.774.800	Rp 9.085.696.116	Rp 5.115.078.684	64%
16.	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rp 706.709.800	Rp 636.288.170	Rp 70.421.630	90%
17.	Pengadaan Marka Jalan	Rp 510.000.000	Rp 495.571.000	Rp 14.429.000	97%
18.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Rp 267.300.000	Rp 194.101.195	Rp 73.198.805	73%
19.	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rp 12.716.765.000	Rp 7.759.735.751	Rp 4.957.029.249	61%
6.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp 923.540.800	Rp 892.579.790	Rp 30.961.010	97%
20.	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Rp 225.000.000	Rp 217.027.790	Rp 7.972.210	0%
21.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Rp 449.970.000	Rp 430.695.000	Rp 19.275.000	96%
22.	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Rp 248.570.800	Rp 244.857.000	Rp 3.713.800	99%
	Jumlah Belanja	Rp 18.334.983.400	Rp 13.036.342.649	Rp 5.298.640.751	71%
Keterangan : *) SPJ FUNGSIONAL DAN LRA tahun 2020					

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Alokasi anggaran untuk program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan sebesar Rp. 1.663.063.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.563.877.900,- sisa anggaran sebesar Rp. 99.185.300,-atau tercapai sebesar 94%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 419.373.200,- dan realisasi sebesar Rp. 416.071.050,- sisa

anggaran sebesar Rp. 3.302.150,-atau 99%.

Output Kegiatan adalah Tersedianya Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK

- b. **Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 448.096.000,- dan realisasi sebesar Rp. 438.018.150,- sisa anggaran sebesar Rp. 10.077.850,-atau 98%.

Output Kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Teknis penataan lalu lintas di Kabupaten Cirebon.

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK

- c. **Kegiatan koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.992.300,- dan realisasi sebesar Rp. 23.494.700,- sisa anggaran sebesar Rp. 26.497.600 atau 47 %.

Output Kegiatan adalah Terlaksanakannya koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK

- d. **Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 370.684.000,- dan realisasi sebesar Rp 354.184.450,- sisa anggaran sebesar Rp. 16.499.550,- atau 96%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Terminal angkutan darat yang

terkelola dengan baik

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK

- e. **Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 196.791.200.- dan realisasi sebesar Rp. 195.349.200 ,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.442.000,-atau 99 %.

Output Kegiatan adalah Jumlah petugas parkir yang dibina

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK

- f. **Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisis Dampak Lalu Lintas** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.126.500,- dan realisasi sebesar Rp. 87.510.350,- sisa anggaran sebesar Rp. 40.616.150,- atau 68%.

Output Kegiatan adalah Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian analisis dampak lalu lintas

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK

- g. **Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 49.250.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 750.000,- atau 99%.

Output Kegiatan adalah Terselenggarakannya sosialisasi dan pembinaan hasil rekomendasi analisa dampak lalu lintas.

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata

kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK

2. **Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

Alokasi anggaran untuk program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ sebesar Rp. 539.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 512.339.300,- sisa anggaran sebesar Rp. 27.220.700,- atau tercapai sebesar 95%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian

- a. **Kendaraan Bermotor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.980.000,- dan realisasi sebesar Rp. 99.140.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 840.000,- atau 99%.

Output Kegiatan adalah Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Outcome kegiatan adalah Rasio sarana dan prasarana pengujian yang layak.

- b. **Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 439.580.000,- dan realisasi sebesar Rp. 413.199.300,- sisa anggaran sebesar Rp. 26.380.700,- atau 94 %.

Output Kegiatan adalah Tersedianya balai uji yang representatif

Outcome kegiatan adalah Rasio sarana dan prasarana pengujian yang layak.

3. **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

Alokasi anggaran untuk program peningkatan pelayanan angkutan sebesar Rp. 758.044.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 733.906.950,- sisa anggaran sebesar Rp. 24.137.650,- atau tercapai sebesar 99 %.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. **Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.413.000,- dan realisasi sebesar Rp. 114.680.700,- sisa anggaran sebesar Rp. 732.300,- atau 99%.
- Output** Kegiatan adalah Penindakan pidana ringan lalu lintas dan angkutan jalan
- Outcome** kegiatan adalah Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas
- b. **Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.093.600 ,- dan realisasi sebesar Rp. 83.663.600,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.430.000 ,- atau 98%.
- Output** kegiatan adalah tersedianya database angkutan darat dan laut.
- Outcome** kegiatan ini adalah dokumen database pelayanan jasa angkutan darat dan laut.
- c. **Kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 510.604.650,- sisa anggaran sebesar Rp. 19.395.350,- atau 96 %.
- Output** kegiatan adalah Terselenggarakannya pengaturan dan pengawasan lalu lintas
- Outcome** kegiatan ini adalah Terwujudnya keselamatan berlalulintas.
- d. **Kegiatan Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.738.000,- dan realisasi sebesar Rp. 23.158.000 ,- sisa anggaran sebesar Rp. 2.580.000,-atau 90 %.
- Output** kegiatan adalah Terkoordinasinya penanganan keselamatan lalu lintas
- Outcome** kegiatan ini adalah Terwujudnya keselamatan berlalulintas.

- e. **Kegiatan Penyusunan Database Kecelakaan Transportasi** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.800.000,- atau 100 %.
- Output** kegiatan adalah Tersedianya database kecelakaan berlalu lintas
- Outcome** kegiatan ini adalah Terwujudnya keselamatan berlalulintas

4. **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.**

Alokasi anggaran untuk program pembangunan sarana dan prasaran perhubungan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 247.942.593,- sisa anggaran sebesar Rp. 2.057.407,- atau tercapai sebesar 99%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. **Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal** dengan alokasi anggaran Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 247.942.593,- sisa anggaran sebesar Rp. 2.057.407,-atau tercapai sebesar 99%.
- Output** kegiatan adalah Tersedianya halte bus, halte BRT, taxi dan gedung terminal
- Outcome** kegiatan ini adalah Rasio ketersediaanya sarana dan prasarana perhubungan(Halte dan Terminal) yang layak fungsi.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

5. Alokasi anggaran untuk program pengendalian dan pengamanan lalu lintas sebesar Rp. 14.200.774.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.085.696.116,- sisa anggaran sebesar Rp. 5.115.078.684,-atau tercapai sebesar 64 %.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. **Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 706.709.800,- dan realisasi sebesar Rp. 636.288.170,- sisa anggaran sebesar Rp. 70.421.630,-atau 90 %.
- Output** kegiatan adalah Terpasangnya rambu, Running text, Warning light, RPPJ, Traffic light dan cermin cekung

Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya kelancaran dan Aksesibilitas Transportasi.

- b. **Kegiatan Pengadaan Marka Jalan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 510.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 495.571.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 14.429.000,-atau 97 %.

Output kegiatan adalah Terpasangnya marka jalan, zebra cross, zoss dan paku jalan

Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya kelancaran dan Aksesibilitas Transportasi.

- c. **Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 267.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 194.101.195,- sisa anggaran sebesar Rp. 73.198.805,-atau 73 %.

Output kegiatan adalah Terpasangnya pagar pengaman jalan dan delineator

Outcome kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengaman lalu lintas yang berfungsi dengan baik

- d. **Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.716.765.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.759.735.751,- sisa anggaran sebesar Rp. 4.957.029.249,-atau 61 %.

Output kegiatan adalah Terpasangnya penerangan jalan umum

Outcome kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengaman lalu lintas yang berfungsi dengan baik

6. **Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

Alokasi anggaran untuk program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor sebesar Rp. 923.540.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 892.579.790,- sisa anggaran sebesar Rp. 30.961.010,- atau tercapai sebesar 97%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. **Kegiatan Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 217.027.790,- sisa anggaran sebesar

Rp. 7.972.210,-atau 96 %.

Output kegiatan adalah Tersedianya balai uji yang representatif

Outcome kegiatan ini adalah Persentase kepemilikan KIR/Wajib uji angkutan umum

- b. **Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.449.970.000,- dan realisasi sebesar Rp. 430.695.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 19.275.000,- atau 96 %.

Output kegiatan adalah Tersedianya alat uji dan kelengkapan di pengujian kendaraan bermotor

Outcome kegiatan ini adalah Persentase kepemilikan KIR/Wajib uji angkutan umum

- c. **Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan bermotor**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 248.570.800,- dan realisasi sebesar Rp. 244.857.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 3.713.800,-atau 99%

Output kegiatan adalah Terlaksanakanya pengujian kendaraan bermotor

Outcome kegiatan ini adalah Persentase kepemilikan KIR/Wajib uji angkutan umum

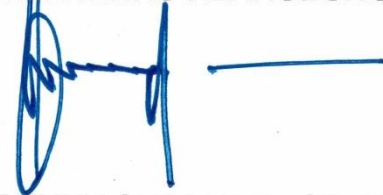
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menyajikan pencapaian dari sasaran yang tercermin pada capaian indikator kinerja dari 3 sasaran kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Secara umum, sasaran yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Dinas Perhubungan.

Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2020 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon pada hakekatnya adalah berkat rahmat serta karunia Allah SWT, tetapi sangat disadari bahwa dengan keterbatasan yang dalam pelaksanaannya belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian permasalahan yang dihadapi mampu diselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada. Permasalahan pada tahun 2020 dijadikan sebagai catatan untuk selanjutnya dapat dijadikan tolok ukur dalam peningkatan kinerja aparatur Dinas Perhubungan khususnya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

Sumber, 10 Februari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620209 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAKIP TAHUN 2020

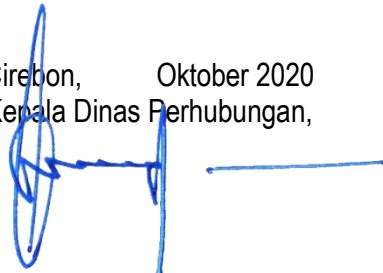
DINAS PERHUBUNGAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
(IKK/IKU) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020

No	Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.1.1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.75 V/C
2	1.1.2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	82.89 Prosen
3	1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	100 Prosen

Cirebon, Oktober 2020
Kepala Dinas Perhubungan,


H.DENNY SUPDIANA, SE.,M.Si.
NIP. 19620209 199003 1 004

RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGIS													
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas													
INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0,76 VC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75 V/C

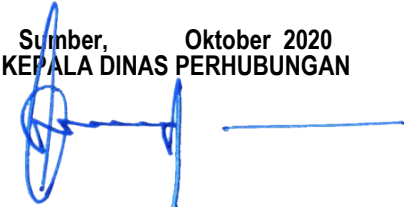
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS													
Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan													
INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	82.77%	82.78	82.79	82.8	82.81	82.82	82.83	82.84	82.85	82.86	82.87	82.88	82.89 %

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGIS													
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai													
INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	100%	7	15	23	31	39	47	57	67	76	84	92	100%

Sumber, Oktober 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERHUBUNGAN**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag.
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2020

Pihak Kedua,



Drs. H. IMRON, M.Ag.

Pihak Kesatu,

H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus (4)	Tipe (5)	Target (6)		Sebelum (8)	Sesudah (9)
(1)								
1.1.	Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunnya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	209 Kecelakaan	209 Kecelakaan
1.1.1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	Volume kendaraan dibagi Kapasitas jalan (LHR)	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	0.75 V/C	0.75 V/C
1.1.2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Jumlah angkutan umum yang lulus uji dibagi Jumlah angkutan umum di Kabupaten Cirebon	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	82.89 Prosen	82.89 Prosen
1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan		Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	100 Prosen	100 Prosen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum (3)	Sesudah (4)	
(1)				
1.1.1.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.758.740.700,00	1.663.063.200,00	Sumber Dana: DAU
1.1.1.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	238.115.000,00	250.000.000,00	Sumber Dana: DAU
1.1.1.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	25.601.846.000,00	14.200.774.800,00	Sumber Dana: DAU, PAD
1.1.2.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	539.560.000,00	539.560.000,00	Sumber Dana: DAU
1.1.2.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	926.970.300,00	758.044.600,00	Sumber Dana: DAU
1.1.2.20.	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	978.540.800,00	923.540.800,00	Sumber Dana: DAU
1.1.3.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	35.051.327.800,00	34.823.146.100,00	Sumber Dana: DAU
1.1.3.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	418.777.600,00	418.777.600,00	Sumber Dana: DAU
1.1.3.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	173.675.000,00	180.000.000,00	Sumber Dana: DAU
1.1.3.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	208.220.800,00	186.392.800,00	Sumber Dana: DAU
1.1.3.07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	69.619.000,00	79.619.000,00	Sumber Dana: DAU
	J U M L A H	65.965.393.000,00	54.022.918.900,00	

Simonek, Cirebon 2008
Pihak Kesatu
Kepala Dinas Perhubungan,



H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004



Drs. H. IMRON, M.Ag.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.300.000.000,00	2.417.052.100,00	105,09	2.644.214.500,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.300.000.000,00	2.417.052.100,00	105,09	2.644.214.500,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	2.300.000.000,00	2.417.052.100,00	105,09	2.644.214.500,00
1.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	2.200.000.000,00	2.295.010.100,00	104,32	2.489.070.000,00
1.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	331.543.000,00	110,51	270.744.000,00
1.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.900.000.000,00	1.963.467.100,00	103,34	2.218.326.000,00
1.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00	122.042.000,00	122,04	155.144.500,00
1.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	100.000.000,00	122.042.000,00	122,04	155.144.500,00
2.	BELANJA DAERAH	62.444.690.900,00	52.797.019.456,00	84,55	58.249.391.164,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.421.772.000,00	7.658.855.062,00	90,94	7.269.272.924,00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.421.772.000,00	7.658.855.062,00	90,94	7.269.272.924,00
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.398.699.000,00	3.986.235.967,00	90,62	4.140.179.743,00
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	3.167.433.000,00	2.897.762.200,00	91,49	3.147.693.600,00
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga (Istri/Suami + Anak)	384.723.000,00	354.091.366,00	92,04	385.236.446,00
2.1.1.01.03.	Tunjangan Struktural / Jabatan	161.919.000,00	161.625.000,00	99,82	164.910.000,00
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	34.545.000,00	31.100.000,00	90,03	33.110.000,00
2.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	110.608.000,00	101.800.000,00	92,04	115.025.000,00
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	228.094.000,00	181.556.940,00	79,60	200.168.880,00
2.1.1.01.07.	Tunjangan Khusus / Tunjangan PPh	4.255.000,00	3.514.768,00	82,60	3.357.396,00
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	42.000,00	37.018,00	88,14	48.039,00
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	267.962.000,00	230.855.415,00	86,15	90.630.382,00
2.1.1.01.21.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	9.780.000,00	5.973.330,00	61,08	0,00
2.1.1.01.22.	Jaminan Kematian (JKM)	29.338.000,00	17.919.930,00	61,08	0,00
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.908.073.000,00	3.563.443.000,00	91,18	3.043.826.000,00
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	3.908.073.000,00	3.563.443.000,00	91,18	3.043.826.000,00
2.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	115.000.000,00	109.176.095,00	94,94	85.267.181,00
2.1.1.07.01.	Belanja Retribusi	115.000.000,00	109.176.095,00	94,94	85.267.181,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	54.022.918.900,00	45.138.164.394,00	83,55	50.980.118.240,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.143.371.000,00	2.039.959.000,00	95,18	1.817.328.000,00
2.2.1.01.	Honorarium PNS	169.350.000,00	121.475.000,00	71,73	125.975.000,00
2.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	39.800.000,00	100,00	39.800.000,00
2.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	102.550.000,00	71.550.000,00	69,77	70.800.000,00
2.2.1.01.06.	Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan	27.000.000,00	10.125.000,00	37,50	15.375.000,00
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.897.950.000,00	1.843.025.000,00	97,11	1.630.195.000,00
2.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.317.600.000,00	1.316.050.000,00	99,88	1.244.200.000,00
2.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Saku/Pengganti Transport Peserta Kegiatan	580.350.000,00	526.975.000,00	90,80	385.995.000,00
2.2.1.03.	Uang Lembur	76.071.000,00	75.459.000,00	99,20	61.158.000,00
2.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	48.351.000,00	48.069.000,00	99,42	34.158.000,00
2.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	27.720.000,00	27.390.000,00	98,81	27.000.000,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.953.297.100,00	38.574.934.585,00	89,81	36.065.987.812,00
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	238.825.400,00	238.668.250,00	99,93	281.350.300,00
2.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	141.421.800,00	141.264.650,00	99,89	118.737.300,00
2.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.201.900,00	18.201.900,00	100,00	22.012.000,00
2.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	55.579.800,00	55.579.800,00	100,00	40.744.400,00
2.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	0,00	0,00	31.125.000,00
2.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.165.100,00	4.165.100,00	100,00	0,00
2.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.408.800,00	1.408.800,00	100,00	1.056.600,00
2.2.2.01.10.	Belanja Kit Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	65.925.000,00
2.2.2.01.12.	Belanja Kelengkapan (Aksesoris) Komputer	-	0,00	0,00	1.750.000,00
2.2.2.01.15.	Belanja Piring/Gelas/Sendok/Garpu/Namp an/Mangkok/Cangkir/Asbak	10.548.000,00	10.548.000,00	100,00	0,00
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.789.600,00	195.957.990,00	97,59	2.635.467.000,00
2.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	-	0,00	0,00	39.566.000,00
2.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	9.035.000,00	9.035.000,00	100,00	0,00
2.2.2.02.09.	Belanja Bahan/Material Penerangan Jalan, Rambu Jalan, Taman dan Hutan Kota	188.004.600,00	183.172.990,00	97,43	2.579.901.000,00
2.2.2.02.11.	Belanja Bahan/Material Perbengkelan	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	16.000.000,00
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.599.598.000,00	30.248.151.493,00	90,03	29.616.214.506,00
2.2.2.03.01.	Belanja Telepon	40.800.000,00	15.698.915,00	38,48	15.906.905,00
2.2.2.03.02.	Belanja Air	40.800.000,00	12.491.600,00	30,62	19.689.260,00
2.2.2.03.03.	Belanja Listrik	33.418.398.000,00	30.130.727.003,00	90,16	29.480.161.432,00
2.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	39.600.000,00	29.233.975,00	73,82	24.280.000,00
2.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	-	0,00	0,00	6.887.000,00
2.2.2.03.13.	Belanja Jasa Publikasi	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	69.289.909,00
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	83.724.000,00	55.865.730,00	66,73	38.495.600,00
2.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	74.064.000,00	52.912.200,00	71,44	38.495.600,00
2.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	9.660.000,00	2.953.530,00	30,57	0,00
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	681.025.350,00	637.843.750,00	93,66	669.715.006,00
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	174.200.000,00	173.360.000,00	99,52	244.270.000,00
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.720.000,00	36.360.000,00	99,02	20.600.000,00
2.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	420.105.350,00	413.852.750,00	98,51	387.378.306,00
2.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	3.500.000,00	0,00	0,00	225.000,00
2.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	46.500.000,00	14.271.000,00	30,69	17.241.700,00
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	915.301.450,00	733.745.150,00	80,16	1.216.651.400,00
2.2.2.06.01.	Belanja Cetak	820.568.100,00	639.469.600,00	77,93	1.113.436.500,00
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	68.612.600,00	68.602.600,00	99,99	72.831.000,00
2.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	8.107.000,00	7.744.200,00	95,52	5.888.000,00
2.2.2.06.04.	Belanja Cetak Buku, Majalah, Profil	17.803.750,00	17.718.750,00	99,52	24.438.900,00
2.2.2.06.05.	Belanja Cetak Foto	210.000,00	210.000,00	100,00	57.000,00
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00	115.660.000,00
2.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	-	0,00	0,00	14.000.000,00
2.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	36.800.000,00	36.800.000,00	100,00	101.660.000,00
2.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kamar Hotel	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.400.000,00	50.400.000,00	100,00	28.800.000,00
2.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda / Panggung	50.400.000,00	50.400.000,00	100,00	28.800.000,00
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	397.485.000,00	331.237.000,00	83,33	269.290.000,00
2.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	133.120.000,00	92.672.000,00	69,62	28.918.000,00
2.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.475.000,00	52.675.000,00	67,12	59.550.000,00
2.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	13.420.000,00
2.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	177.640.000,00	177.640.000,00	100,00	88.020.000,00
2.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	-	0,00	0,00	79.382.000,00
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	0,00	0,00	69.492.500,00
2.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	0,00	0,00	69.492.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	283.765.000,00	280.293.000,00	98,78	200.890.500,00
2.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	283.765.000,00	280.293.000,00	98,78	200.890.500,00
2.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	0,00	0,00	23.050.000,00
2.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	-	0,00	0,00	23.050.000,00
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	449.197.800,00	441.587.802,00	98,31	388.710.000,00
2.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	217.775.000,00	210.775.000,00	96,79	247.550.000,00
2.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	231.422.800,00	230.812.802,00	99,74	141.160.000,00
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.412.535.500,00	5.042.583.420,00	93,16	286.699.000,00
2.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	255.549.000,00
2.2.2.20.04.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.898.000,00	20.898.000,00	100,00	0,00
2.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	5.600.000,00
2.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	15.537.500,00	15.537.500,00	100,00	13.550.000,00
2.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat-alat Bengkel	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00	0,00
2.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan / Service	5.302.500.000,00	4.932.747.920,00	93,03	12.000.000,00
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	577.500.000,00	256.201.000,00	44,36	180.502.000,00
2.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	577.500.000,00	256.201.000,00	44,36	180.502.000,00
2.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	25.350.000,00	24.600.000,00	97,04	45.000.000,00
2.2.2.30.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber PNS	15.900.000,00	15.150.000,00	95,28	37.400.000,00
2.2.2.30.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Non PNS	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	7.600.000,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	8.926.250.800,00	4.523.270.809,00	50,67	13.096.802.428,00
2.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	0,00	0,00	194.125.000,00
2.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	-	0,00	0,00	194.125.000,00
2.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	2.541.000,00	2.541.000,00	100,00	10.164.000,00
2.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	2.541.000,00	2.541.000,00	100,00	10.164.000,00
2.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	3.520.000,00
2.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Tabung dan Selang Pemadam Kebakaran	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	0,00
2.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	-	0,00	0,00	3.520.000,00
2.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.041.000,00	23.018.000,00	99,90	61.545.000,00
2.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	0,00	0,00	24.640.000,00
2.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	-	0,00	0,00	15.180.000,00
2.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.628.000,00	1.628.000,00	100,00	0,00
2.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC Split / Pendingin Ruangan	4.108.000,00	4.108.000,00	100,00	21.725.000,00
2.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Loker	12.023.000,00	12.000.000,00	99,81	0,00
2.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghisap Debu (Vacuum Cleaner)	4.082.000,00	4.082.000,00	100,00	0,00
2.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Pembersih Udara (Air Purifier)	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
2.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.862.000,00	32.862.000,00	100,00	77.550.000,00
2.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan komputer/PC	9.275.000,00	9.275.000,00	100,00	40.150.000,00
2.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
2.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	0,00	0,00	37.400.000,00
2.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	12.387.000,00	12.387.000,00	100,00	0,00
2.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	65.945.000,00
2.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	29.920.000,00
2.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	-	0,00	0,00	36.025.000,00
2.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.464.000,00	3.464.000,00	100,00	0,00
2.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas dan Perlengkapannya	318.000,00	318.000,00	100,00	0,00
2.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	635.000,00	635.000,00	100,00	0,00
2.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring	2.511.000,00	2.511.000,00	100,00	0,00
2.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	81.300.000,00
2.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	-	0,00	0,00	30.920.000,00
2.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	-	0,00	0,00	12.980.000,00
2.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan Sound System	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
2.2.3.16.11.	Belanja Modal Alat-alat Studio Visual	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00	37.400.000,00
2.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	51.476.800,00	50.816.000,00	98,72	0,00
2.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
2.2.3.17.15.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan WAN	47.476.800,00	46.816.000,00	98,61	0,00
2.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	792.895.000,00	757.307.300,00	95,51	352.625.000,00
2.2.3.18.03.	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi	-	0,00	0,00	348.700.000,00
2.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Jarak	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00	3.925.000,00
2.2.3.18.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan	790.235.000,00	754.647.300,00	95,50	0,00
2.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
2.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
2.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	259.500.000,00	190.401.195,00	73,37	967.800.000,00
2.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	259.500.000,00	190.401.195,00	73,37	967.800.000,00
2.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.611.000,00	6.611.000,00	100,00	0,00
2.2.3.23.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Air Bersih	6.611.000,00	6.611.000,00	100,00	0,00
2.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	6.825.000.000,00	2.595.148.481,00	38,02	10.479.798.428,00
2.2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	6.825.000.000,00	2.595.148.481,00	38,02	10.479.798.428,00
2.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/(Pembelian*) Bangunan	870.260.000,00	802.501.833,00	92,21	802.430.000,00
2.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	221.000.000,00	215.027.790,00	97,30	309.470.000,00
2.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	409.260.000,00	349.531.450,00	85,41	88.016.000,00
2.2.3.26.21.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung terminal	-	0,00	0,00	196.097.000,00
2.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte	240.000.000,00	237.942.593,00	99,14	208.847.000,00
2.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
2.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(60.144.690.900,00)	(50.379.967.356,00)	83,76	(55.605.176.664,00)

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
Pegguna Anggaran : H. DENNY SUPDIANA, SE.,M.Si.
Bendahara Pengeluaran : SUMARTONO, SE.
Tahun Anggaran : 2020
Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.421.772.000,00	6.580.789.565	1.078.065.497	7.658.855.062	-	-	-	-	-	-	7.658.855.062	762.916.938
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.421.772.000,00	6.580.789.565	1.078.065.497	7.658.855.062	-	-	-	-	-	-	7.658.855.062	762.916.938
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.398.699.000,00	3.609.726.565	376.509.402	3.986.235.967	-	-	-	-	-	-	3.986.235.967	412.463.033
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	3.167.433.000,00	2.700.701.600	197.060.600	2.897.762.200	-	-	-	-	-	-	2.897.762.200	269.670.800
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga (Istri/Suami + Anak)	384.723.000,00	330.720.010	23.371.356	354.091.366	-	-	-	-	-	-	354.091.366	30.631.634
5.1.1.01.03.	Tunjangan Struktural / Jabatan	161.919.000,00	149.460.000	12.165.000	161.625.000	-	-	-	-	-	-	161.625.000	294.000
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	34.545.000,00	29.020.000	2.080.000	31.100.000	-	-	-	-	-	-	31.100.000	3.445.000
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	110.608.000,00	95.060.000	6.740.000	101.800.000	-	-	-	-	-	-	101.800.000	8.808.000
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	228.094.000,00	167.145.360	14.411.580	181.556.940	-	-	-	-	-	-	181.556.940	46.537.060
5.1.1.01.07.	Tunjangan Khusus / Tunjangan PPh	4.255.000,00	3.310.004	204.764	3.514.768	-	-	-	-	-	-	3.514.768	740.232
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	42.000,00	34.456	2.562	37.018	-	-	-	-	-	-	37.018	4.982
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	267.962.000,00	112.273.659	118.581.756	230.855.415	-	-	-	-	-	-	230.855.415	37.106.585
5.1.1.01.21.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	9.780.000,00	5.500.383	472.947	5.973.330	-	-	-	-	-	-	5.973.330	3.806.670
5.1.1.01.22.	Jaminan Kematian (JKM)	29.338.000,00	16.501.093	1.418.837	17.919.930	-	-	-	-	-	-	17.919.930	11.418.070
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.908.073.000,00	2.971.063.000	592.380.000	3.563.443.000	-	-	-	-	-	-	3.563.443.000	344.630.000
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	3.908.073.000,00	2.971.063.000	592.380.000	3.563.443.000	-	-	-	-	-	-	3.563.443.000	344.630.000
5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	115.000.000,00	-	109.176.095	109.176.095	-	-	-	-	-	-	109.176.095	5.823.905
5.1.1.07.01.	Belanja Retribusi	115.000.000,00	-	109.176.095	109.176.095	-	-	-	-	-	-	109.176.095	5.823.905

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	54.022.918.900,00	-	-	-	33.943.752.058	5.765.450.884	39.709.202.942	4.332.721.738	1.096.239.714	5.428.961.452	45.138.164.394	8.884.754.506
2.09.01.2.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	34.823.146.100,00	-	-	-	27.857.975.887	2.422.698.806	30.280.674.693	888.165.988	81.689.464	969.855.452	31.250.530.145	3.572.615.955
2.09.01.2.09.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.499.998.000,00	-	-	-	27.601.906.337	2.422.698.806	30.024.605.143	123.715.768	10.596.607	134.312.375	30.158.917.518	3.341.080.482
2.09.01.2.09.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	40.800.000,00	-	-	-	-	-	-	14.170.646	1.528.269	15.698.915	15.698.915	25.101.085
2.09.01.2.09.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	40.800.000,00	-	-	-	-	-	-	11.546.260	945.340	12.491.600	12.491.600	28.308.400
2.09.01.2.09.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	33.418.398.000,00	-	-	-	27.601.906.337	2.422.698.806	30.024.605.143	97.998.862	8.122.998	106.121.860	30.130.727.003	3.287.670.997
2.09.01.2.09.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	11.393.700	2.877.300	14.271.000	14.271.000	35.729.000
2.09.01.2.09.01.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
2.09.01.2.09.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	46.500.000,00	-	-	-	-	-	-	11.393.700	2.877.300	14.271.000	14.271.000	32.229.000
2.09.01.2.09.01.01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.137.500,00	-	-	-	-	-	-	15.631.684	5.505.816	21.137.500	21.137.500	-
2.09.01.2.09.01.01.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.09.01.01.09.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	-	-	-	-	-	-	4.200.000	1.400.000	5.600.000	5.600.000	-
2.09.01.2.09.01.01.09.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	15.537.500,00	-	-	-	-	-	-	11.431.684	4.105.816	15.537.500	15.537.500	-
2.09.01.2.09.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	79.044.300,00	-	-	-	73.487.150	-	73.487.150	4.524.000	876.000	5.400.000	78.887.150	157.150
2.09.01.2.09.01.01.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000	-	900.000	900.000	-
2.09.01.2.09.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	73.644.300,00	-	-	-	73.487.150	-	73.487.150	-	-	-	73.487.150	157.150

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.01.2.09.01.01.1 0.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	3.624.000	876.000	4.500.000	4.500.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 0.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.09.01.01.1 1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	793.949.500,00	-	-	-	182.582.400	-	182.582.400	429.818.600	-	429.818.600	612.401.000	181.548.500
2.09.01.2.09.01.01.1 1.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000	-	900.000	900.000	3.000.000
2.09.01.2.09.01.01.1 1.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	786.130.900,00	-	-	-	182.582.400	-	182.582.400	425.000.000	-	425.000.000	607.582.400	178.548.500
2.09.01.2.09.01.01.1 1.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.918.600,00	-	-	-	-	-	-	3.918.600	-	3.918.600	3.918.600	-
2.09.01.2.09.01.01.1 2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	14.992.900,00	-	-	-	-	-	-	13.064.500	1.928.400	14.992.900	14.992.900	-
2.09.01.2.09.01.01.1 2.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.992.900,00	-	-	-	-	-	-	13.064.500	1.928.400	14.992.900	14.992.900	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.075.900,00	-	-	-	-	-	-	117.892.100	-	117.892.100	117.892.100	2.183.800
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	750.000	-	750.000	750.000	1.500.000
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.157.000,00	-	-	-	-	-	-	4.157.000	-	4.157.000	4.157.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.165.100,00	-	-	-	-	-	-	4.165.100	-	4.165.100	4.165.100	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	9.035.000,00	-	-	-	-	-	-	9.035.000	-	9.035.000	9.035.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000	40.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Tabung dan Selang Pemadam Kebakaran	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-	3.300.000	-	3.300.000	3.300.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.628.000,00	-	-	-	-	-	-	1.628.000	-	1.628.000	1.628.000	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC Split / Pendingin Ruangan	4.108.000,00	-	-	-	-	-	-	4.108.000	-	4.108.000	4.108.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Loker	12.023.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	23.000
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghisap Debu (Vacuum Cleaner)	4.082.000,00	-	-	-	-	-	-	4.082.000	-	4.082.000	4.082.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Pembersih Udara (Air Purifier)	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan Sound System	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000.000	-	8.000.000	8.000.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.17.15.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan WAN	47.476.800,00	-	-	-	-	-	-	46.816.000	-	46.816.000	46.816.000	660.800
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 3.5.2.3.23.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Air Bersih	6.611.000,00	-	-	-	-	-	-	6.611.000	-	6.611.000	6.611.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.762.000,00	-	-	-	-	-	-	14.012.000	-	14.012.000	14.012.000	750.000
2.09.01.2.09.01.01.1 4.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000
2.09.01.2.09.01.01.1 4.5.2.2.01.15.	Belanja Piring/Gelas/Sendok/Garpu/Nampan/Mangkok/Cangkir/Asbak	10.548.000,00	-	-	-	-	-	-	10.548.000	-	10.548.000	10.548.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 4.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas dan Perlengkapannya	318.000,00	-	-	-	-	-	-	318.000	-	318.000	318.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 4.5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	635.000,00	-	-	-	-	-	-	635.000	-	635.000	635.000	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.01.2.09.01.01.1 4.5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring	2.511.000,00	-	-	-	-	-	-	2.511.000	-	2.511.000	2.511.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	90.453.500	19.180.475	109.633.975	109.633.975	10.366.025
2.09.01.2.09.01.01.1 5.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	39.600.000,00	-	-	-	-	-	-	24.873.500	4.360.475	29.233.975	29.233.975	10.366.025
2.09.01.2.09.01.01.1 5.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Publikasi	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 5.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.400.000,00	-	-	-	-	-	-	5.580.000	14.820.000	20.400.000	20.400.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.900.000,00	-	-	-	-	-	-	19.520.000	580.000	20.100.000	20.100.000	800.000
2.09.01.2.09.01.01.1 7.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.400.000,00	-	-	-	-	-	-	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000	800.000
2.09.01.2.09.01.01.1 7.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.250.000,00	-	-	-	-	-	-	7.980.000	270.000	8.250.000	8.250.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 7.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.250.000,00	-	-	-	-	-	-	7.940.000	310.000	8.250.000	8.250.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 8.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	88.286.000,00	-	-	-	-	-	-	48.140.136	40.144.866	88.285.002	88.285.002	998
2.09.01.2.09.01.01.1 8.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-	2.625.000	2.775.000	5.400.000	5.400.000	-
2.09.01.2.09.01.01.1 8.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.886.000,00	-	-	-	-	-	-	45.515.136	37.369.866	82.885.002	82.885.002	998
2.09.01.2.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	418.777.600,00	-	-	-	-	-	-	380.183.950	31.582.900	411.766.850	411.766.850	7.010.750
2.09.01.2.09.01.02.0 3.	Pembangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	49.090.000	-	49.090.000	49.090.000	910.000
2.09.01.2.09.01.02.0 3.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000	-	900.000	900.000	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.01.2.09.01.02.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-
2.09.01.2.09.01.02.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	100.000	-
2.09.01.2.09.01.02.03.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47.000.000,00	-	-	-	-	-	-	46.090.000	-	46.090.000	46.090.000	910.000
2.09.01.2.09.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	228.577.600,00	-	-	-	-	-	-	201.843.950	23.432.900	225.276.850	225.276.850	3.300.750
2.09.01.2.09.01.02.22.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	151.250.000	13.750.000	165.000.000	165.000.000	-
2.09.01.2.09.01.02.22.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	51.422.800,00	-	-	-	-	-	-	42.641.100	8.781.700	51.422.800	51.422.800	-
2.09.01.2.09.01.02.22.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.408.800,00	-	-	-	-	-	-	1.056.600	352.200	1.408.800	1.408.800	-
2.09.01.2.09.01.02.22.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	9.504.000,00	-	-	-	-	-	-	6.525.000	549.000	7.074.000	7.074.000	2.430.000
2.09.01.2.09.01.02.22.5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	1.242.000,00	-	-	-	-	-	-	371.250	-	371.250	371.250	870.750
2.09.01.2.09.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90.200.000,00	-	-	-	-	-	-	80.550.000	8.150.000	88.700.000	88.700.000	1.500.000
2.09.01.2.09.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.200.000,00	-	-	-	-	-	-	10.550.000	1.650.000	12.200.000	12.200.000	-
2.09.01.2.09.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	78.000.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000.000	6.500.000	76.500.000	76.500.000	1.500.000
2.09.01.2.09.01.02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	48.700.000	-	48.700.000	48.700.000	1.300.000
2.09.01.2.09.01.02.42.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000
2.09.01.2.09.01.02.42.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000	-	600.000	600.000	-
2.09.01.2.09.01.02.42.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	100.000	-

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.01.2.09.01.06.01.5.2.2.30.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber PNS	1.150.000,00	-	-	-	-	-	-	1.150.000	-	1.150.000	1.150.000	-
2.09.01.2.09.01.06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.400.000	7.600.000	15.000.000	15.000.000	-
2.09.01.2.09.01.06.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.120.000,00	-	-	-	-	-	-	3.060.000	3.060.000	6.120.000	6.120.000	-
2.09.01.2.09.01.06.02.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.880.000,00	-	-	-	-	-	-	1.440.000	1.440.000	2.880.000	2.880.000	-
2.09.01.2.09.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.800.000,00	-	-	-	-	-	-	2.900.000	2.900.000	5.800.000	5.800.000	-
2.09.01.2.09.01.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	-
2.09.01.2.09.01.06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	50.110.000,00	-	-	-	-	-	-	41.588.700	7.003.000	48.591.700	48.591.700	1.518.300
2.09.01.2.09.01.06.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.200.000,00	-	-	-	-	-	-	34.100.000	3.100.000	37.200.000	37.200.000	-
2.09.01.2.09.01.06.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.040.000,00	-	-	-	-	-	-	2.040.000	-	2.040.000	2.040.000	-
2.09.01.2.09.01.06.04.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-	1.440.000	-	1.440.000	1.440.000	-
2.09.01.2.09.01.06.04.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.112.000,00	-	-	-	-	-	-	725.000	61.000	786.000	786.000	1.326.000
2.09.01.2.09.01.06.04.5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	276.000,00	-	-	-	-	-	-	83.700	-	83.700	83.700	192.300
2.09.01.2.09.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.842.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.842.000	6.842.000	6.842.000	-
2.09.01.2.09.01.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	200.000	-
2.09.01.2.09.01.06.13.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	90.794.800,00	-	-	-	-	-	-	72.654.550	17.041.800	89.696.350	89.696.350	1.098.450
2.09.01.2.09.01.06.13.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	55.800.000,00	-	-	-	-	-	-	51.150.000	4.650.000	55.800.000	55.800.000	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.01.2.09.01.06.1 3.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.896.000,00	-	-	-	-	-	-	3.672.000	1.224.000	4.896.000	4.896.000	-
2.09.01.2.09.01.06.1 3.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	3.456.000,00	-	-	-	-	-	-	2.592.000	864.000	3.456.000	3.456.000	-
2.09.01.2.09.01.06.1 3.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.168.000,00	-	-	-	-	-	-	2.175.000	183.000	2.358.000	2.358.000	810.000
2.09.01.2.09.01.06.1 3.5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	414.000,00	-	-	-	-	-	-	125.550	-	125.550	125.550	288.450
2.09.01.2.09.01.06.1 3.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.660.800,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000	4.660.800	8.660.800	8.660.800	-
2.09.01.2.09.01.06.1 3.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	-	-	-	-	-	-	140.000	460.000	600.000	600.000	-
2.09.01.2.09.01.06.1 3.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	3.600.000	1.200.000	4.800.000	4.800.000	-
2.09.01.2.09.01.06.1 3.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.200.000	3.800.000	9.000.000	9.000.000	-
2.09.01.2.09.01.07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	79.619.000,00	-	-	-	-	-	-	63.491.700	14.297.000	77.788.700	77.788.700	1.830.300
2.09.01.2.09.01.07.0 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	79.619.000,00	-	-	-	-	-	-	63.491.700	14.297.000	77.788.700	77.788.700	1.830.300
2.09.01.2.09.01.07.0 1.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.200.000,00	-	-	-	-	-	-	34.100.000	3.100.000	37.200.000	37.200.000	-
2.09.01.2.09.01.07.0 1.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	15.351.000,00	-	-	-	-	-	-	10.083.000	4.998.000	15.081.000	15.081.000	270.000
2.09.01.2.09.01.07.0 1.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	9.576.000,00	-	-	-	-	-	-	6.300.000	3.234.000	9.534.000	9.534.000	42.000
2.09.01.2.09.01.07.0 1.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.112.000,00	-	-	-	-	-	-	725.000	61.000	786.000	786.000	1.326.000
2.09.01.2.09.01.07.0 1.5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	276.000,00	-	-	-	-	-	-	83.700	-	83.700	83.700	192.300
2.09.01.2.09.01.07.0 1.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.204.000,00	-	-	-	-	-	-	4.800.000	2.404.000	7.204.000	7.204.000	-

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.2.09.01.15.02.5 2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	800.000	700.000	1.500.000	1.500.000	-
2.09.2.09.01.15.02.5 2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	382.000,00	-	-	-	-	-	-	229.200	-	229.200	229.200	152.800
2.09.2.09.01.15.02.5 2.2.06.04.	Belanja Cetak Buku, Majalah, Profil	17.803.750,00	-	-	-	-	-	-	17.718.750	-	17.718.750	17.718.750	85.000
2.09.2.09.01.15.02.5 2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
2.09.2.09.01.15.02.5 2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.225.000,00	-	-	-	-	-	-	3.375.000	4.050.000	7.425.000	7.425.000	1.800.000
2.09.2.09.01.15.02.5 2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.100.000,00	-	-	-	-	-	-	9.300.000	-	9.300.000	9.300.000	2.800.000
2.09.2.09.01.15.02.5 2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.436.800,00	-	-	-	-	-	-	124.827.800	-	124.827.800	124.827.800	609.000
2.09.2.09.01.15.02.5 2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	133.000.000,00	-	-	-	-	-	-	129.041.000	-	129.041.000	129.041.000	3.959.000
2.09.2.09.01.15.02.5 2.2.30.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber PNS	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.800.000	3.200.000	8.000.000	8.000.000	-
2.09.2.09.01.15.02.5 2.2.30.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Non PNS	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.400.000	3.600.000	9.000.000	9.000.000	-
2.09.2.09.01.15.02.5 2.3.16.11.	Belanja Modal Alat-alat Studio Visual	7.300.000,00	-	-	-	-	-	-	7.300.000	-	7.300.000	7.300.000	-
2.09.2.09.01.15.03.	Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan	49.992.300,00	-	-	-	-	-	-	14.424.500	9.070.200	23.494.700	23.494.700	26.497.600
2.09.2.09.01.15.03.5 2.1.01.06.	Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.625.000	4.500.000	10.125.000	10.125.000	16.875.000
2.09.2.09.01.15.03.5 2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.992.100,00	-	-	-	-	-	-	2.524.500	2.295.000	4.819.500	4.819.500	2.172.600
2.09.2.09.01.15.03.5 2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.200,00	-	-	-	-	-	-	200.000	350.200	550.200	550.200	-

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.2.09.01.15.04.5 2.2.30.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.15.07.	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	370.684.000,00	-	-	-	-	-	-	322.607.450	31.577.000	354.184.450	354.184.450	16.499.550
2.09.2.09.01.15.07.5 2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	316.200.000,00	-	-	-	-	-	-	289.850.000	26.350.000	316.200.000	316.200.000	-
2.09.2.09.01.15.07.5 2.1.02.03.	Honorarium/Uang Saku/Pengganti Transport Peserta Kegiatan	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.725.000	-	4.725.000	4.725.000	10.275.000
2.09.2.09.01.15.07.5 2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	1.394.000,00	-	-	-	-	-	-	1.394.000	-	1.394.000	1.394.000	-
2.09.2.09.01.15.07.5 2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	17.952.000,00	-	-	-	-	-	-	12.325.000	1.037.000	13.362.000	13.362.000	4.590.000
2.09.2.09.01.15.07.5 2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	2.346.000,00	-	-	-	-	-	-	711.450	-	711.450	711.450	1.634.550
2.09.2.09.01.15.07.5 2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.292.000,00	-	-	-	-	-	-	702.000	590.000	1.292.000	1.292.000	-
2.09.2.09.01.15.07.5 2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.400.000	3.600.000	9.000.000	9.000.000	-
2.09.2.09.01.15.07.5 2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000	-
2.09.2.09.01.15.09.	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	196.791.200,00	-	-	-	65.758.000	-	65.758.000	122.191.200	7.400.000	129.591.200	195.349.200	1.442.000
2.09.2.09.01.15.09.5 2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000	-	900.000	900.000	-
2.09.2.09.01.15.09.5 2.1.02.03.	Honorarium/Uang Saku/Pengganti Transport Peserta Kegiatan	33.750.000,00	-	-	-	-	-	-	33.750.000	-	33.750.000	33.750.000	-
2.09.2.09.01.15.09.5 2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	1.691.200,00	-	-	-	-	-	-	1.691.200	-	1.691.200	1.691.200	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.2.09.01.15.09.5 2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14.400.000,00	-	-	-	-	-	-	10.800.000	3.600.000	14.400.000	14.400.000	-
2.09.2.09.01.15.09.5 2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	500.000	-
2.09.2.09.01.15.09.5 2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000	-	250.000	250.000	-
2.09.2.09.01.15.09.5 2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-
2.09.2.09.01.15.09.5 2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	20.700.000,00	-	-	-	-	-	-	19.500.000	1.200.000	20.700.000	20.700.000	-
2.09.2.09.01.15.09.5 2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	67.200.000,00	-	-	-	65.758.000	-	65.758.000	-	-	-	65.758.000	1.442.000
2.09.2.09.01.15.09.5 2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.400.000,00	-	-	-	-	-	-	49.800.000	2.600.000	52.400.000	52.400.000	-
2.09.2.09.01.15.10.	Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisa Dampak Lalu Lintas	128.126.500,00	-	-	-	-	-	-	79.839.350	7.671.000	87.510.350	87.510.350	40.616.150
2.09.2.09.01.15.10.5 2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.600.000,00	-	-	-	-	-	-	17.050.000	1.550.000	18.600.000	18.600.000	-
2.09.2.09.01.15.10.5 2.1.02.03.	Honorarium/Uang Saku/Pengganti Transport Peserta Kegiatan	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	15.750.000	2.250.000	18.000.000	18.000.000	27.000.000
2.09.2.09.01.15.10.5 2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	7.284.500,00	-	-	-	-	-	-	7.284.500	-	7.284.500	7.284.500	-
2.09.2.09.01.15.10.5 2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.056.000,00	-	-	-	-	-	-	725.000	61.000	786.000	786.000	270.000
2.09.2.09.01.15.10.5 2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	138.000,00	-	-	-	-	-	-	41.850	-	41.850	41.850	96.150
2.09.2.09.01.15.10.5 2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.880.000,00	-	-	-	-	-	-	6.880.000	-	6.880.000	6.880.000	-
2.09.2.09.01.15.10.5 2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.676.000,00	-	-	-	-	-	-	1.676.000	-	1.676.000	1.676.000	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.2.09.01.15.13.5 .2.2.30.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Non PNS	450.000,00	-	-	-	-	-	-	450.000	-	450.000	450.000	-
2.09.2.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	539.560.000,00	-	-	-	480.307.300	-	480.307.300	26.606.000	5.426.000	32.032.000	512.339.300	27.220.700
2.09.2.09.01.16.01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	99.980.000,00	-	-	-	94.160.000	-	94.160.000	4.380.000	600.000	4.980.000	99.140.000	840.000
2.09.2.09.01.16.01.5 .2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000	-	900.000	900.000	-
2.09.2.09.01.16.01.5 .2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	480.000,00	-	-	-	-	-	-	480.000	-	480.000	480.000	-
2.09.2.09.01.16.01.5 .2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	95.000.000,00	-	-	-	94.160.000	-	94.160.000	-	-	-	94.160.000	840.000
2.09.2.09.01.16.01.5 .2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000	600.000	3.600.000	3.600.000	-
2.09.2.09.01.16.02.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	439.580.000,00	-	-	-	386.147.300	-	386.147.300	22.226.000	4.826.000	27.052.000	413.199.300	26.380.700
2.09.2.09.01.16.02.5 .2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.100.000,00	-	-	-	-	-	-	4.100.000	-	4.100.000	4.100.000	-
2.09.2.09.01.16.02.5 .2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	31.920.000,00	-	-	-	-	-	-	18.126.000	4.826.000	22.952.000	22.952.000	8.968.000
2.09.2.09.01.16.02.5 .2.3.18.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan	403.560.000,00	-	-	-	386.147.300	-	386.147.300	-	-	-	386.147.300	17.412.700
2.09.2.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	758.044.600,00	-	-	-	-	-	-	504.059.350	229.847.600	733.906.950	733.906.950	24.137.650
2.09.2.09.01.17.05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	115.413.000,00	-	-	-	-	-	-	90.688.700	23.992.000	114.680.700	114.680.700	732.300
2.09.2.09.01.17.05.5 .2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.200.000,00	-	-	-	-	-	-	34.100.000	3.100.000	37.200.000	37.200.000	-

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.2.09.01.17.14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.14.5 .2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.14.5 .2.1.02.03.	Honorarium/Uang Saku/Pengganti Transport Peserta Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.14.5 .2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.14.5 .2.2.01.10.	Belanja Kit Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.14.5 .2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.14.5 .2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.14.5 .2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.14.5 .2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.14.5 .2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.14.5 .2.2.30.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.14.5 .2.2.30.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.18.	Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas	530.000.000,00	-	-	-	-	-	-	388.412.650	122.192.000	510.604.650	510.604.650	19.395.350
2.09.2.09.01.17.18.5 .2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	167.400.000,00	-	-	-	-	-	-	153.450.000	13.950.000	167.400.000	167.400.000	-

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.2.09.01.17.21.5 2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.21.5 2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.21.5 2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-
2.09.2.09.01.17.21.5 2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	13.500.000	-	13.500.000	13.500.000	-
2.09.2.09.01.17.23. Kecelakaan Transportasi	Penyusunan Database	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-
2.09.2.09.01.17.23.5 2.1.02.03.	Honorarium/Uang Saku/Pengganti Transport Peserta Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.23.5 2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.23.5 2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.23.5 2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.23.5 2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.23.5 2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-
2.09.2.09.01.17.23.5 2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.17.23.5 2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Jarak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	250.000.000,00	-	-	-	-	198.935.493	198.935.493	20.944.100	28.063.000	49.007.100	247.942.593	2.057.407
2.09.2.09.01.18.02.	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	250.000.000,00	-	-	-	-	198.935.493	198.935.493	20.944.100	28.063.000	49.007.100	247.942.593	2.057.407

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.2.09.01.18.02.5 2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000	1.800.000	2.700.000	2.700.000	-
2.09.2.09.01.18.02.5 2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	1.550.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000	1.450.000	1.550.000	1.550.000	-
2.09.2.09.01.18.02.5 2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	-	-	-	-	-	-	440.000	260.000	700.000	700.000	-
2.09.2.09.01.18.02.5 2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	375.000	375.000	375.000	-
2.09.2.09.01.18.02.5 2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.675.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.675.000	4.675.000	4.675.000	-
2.09.2.09.01.18.02.5 2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte	240.000.000,00	-	-	-	-	198.935.493	198.935.493	19.504.100	19.503.000	39.007.100	237.942.593	2.057.407
2.09.2.09.01.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	14.200.774.800,00	-	-	-	5.271.269.081	2.669.441.585	7.940.710.666	727.394.750	417.590.700	1.144.985.450	9.085.696.116	5.115.078.684
2.09.2.09.01.19.01.	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	706.709.800,00	-	-	-	235.415.070	295.670.000	531.085.070	100.690.900	4.512.200	105.203.100	636.288.170	70.421.630
2.09.2.09.01.19.01.5 2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.600.000	1.400.000	6.000.000	6.000.000	3.400.000
2.09.2.09.01.19.01.5 2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.200.000,00	-	-	-	(1.550.000)	-	(1.550.000)	34.100.000	3.100.000	37.200.000	35.650.000	1.550.000
2.09.2.09.01.19.01.5 2.1.02.03.	Honorarium/Uang Saku/Pengganti Transport Peserta Kegiatan	45.900.000,00	-	-	-	-	-	-	45.900.000	-	45.900.000	45.900.000	-
2.09.2.09.01.19.01.5 2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	790.000,00	-	-	-	-	-	-	790.000	-	790.000	790.000	-
2.09.2.09.01.19.01.5 2.2.02.09.	Belanja Bahan/Material Penerangan Jalan, Rambu Jalan, Taman dan Hutan Kota	188.004.600,00	-	-	-	183.172.990	-	183.172.990	-	-	-	183.172.990	4.831.610
2.09.2.09.01.19.01.5 2.2.02.11.	Belanja Bahan/Material Perbengkelan	3.750.000,00	-	-	-	-	-	-	3.750.000	-	3.750.000	3.750.000	-
2.09.2.09.01.19.01.5 2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.112.000,00	-	-	-	(61.000)	-	(61.000)	1.450.000	12.200	1.462.200	1.401.200	710.800

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	276.000,00	-	-	-	(8.370)	-	(8.370)	83.700	-	83.700	75.330	200.670
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.776.200,00	-	-	-	-	-	-	1.776.200	-	1.776.200	1.776.200	-
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	200.000	-
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	2.541.000,00	-	-	-	-	-	-	2.541.000	-	2.541.000	2.541.000	-
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Jarak	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	409.260.000,00	-	-	-	53.861.450	295.670.000	349.531.450	-	-	-	349.531.450	59.728.550
2.09.2.09.01.19.02.	Pengadaan Marka Jalan	510.000.000,00	-	-	-	394.218.000	96.053.000	490.271.000	5.300.000	-	5.300.000	495.571.000	14.429.000
2.09.2.09.01.19.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	-	-	-	-	-	-	4.200.000	-	4.200.000	4.200.000	2.200.000
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	100.000	-
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	620.000,00	-	-	-	-	-	-	620.000	-	620.000	620.000	-
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	380.000,00	-	-	-	-	-	-	380.000	-	380.000	380.000	-
2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan / Service	502.500.000,00	-	-	-	394.218.000	96.053.000	490.271.000	-	-	-	490.271.000	12.229.000
2.09.2.09.01.19.03.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	267.300.000,00	-	-	-	-	190.401.195	190.401.195	2.300.000	1.400.000	3.700.000	194.101.195	73.198.805
2.09.2.09.01.19.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	4.100.000
2.09.2.09.01.19.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.2.09.01.19.04.5 2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-
2.09.2.09.01.19.04.5 2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	-	-	-	-	-	-	28.700.000	10.300.000	39.000.000	39.000.000	-
2.09.2.09.01.19.04.5 2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan / Service	4.800.000.000,00	-	-	-	4.442.476.920	-	4.442.476.920	-	-	-	4.442.476.920	357.523.080
2.09.2.09.01.19.04.5 2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	315.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.000.000
2.09.2.09.01.19.04.5 2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-
2.09.2.09.01.19.04.5 2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	6.825.000.000,00	-	-	-	199.281.091	2.087.317.390	2.286.598.481	-	308.550.000	308.550.000	2.595.148.481	4.229.851.519
2.09.2.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	923.540.800,00	-	-	-	198.878.790	368.500.000	567.378.790	266.719.700	58.481.300	325.201.000	892.579.790	30.961.010
2.09.2.09.01.20.01.	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	225.000.000,00	-	-	-	199.000.790	-	199.000.790	18.027.000	-	18.027.000	217.027.790	7.972.210
2.09.2.09.01.20.01.5 2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	2.000.000
2.09.2.09.01.20.01.5 2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	500.000	-
2.09.2.09.01.20.01.5 2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	100.000	-
2.09.2.09.01.20.01.5 2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	221.000.000,00	-	-	-	199.000.790	-	199.000.790	16.027.000	-	16.027.000	215.027.790	5.972.210
2.09.2.09.01.20.02.	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	449.970.000,00	-	-	-	-	368.500.000	368.500.000	31.510.000	30.685.000	62.195.000	430.695.000	19.275.000
2.09.2.09.01.20.02.5 2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.900.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000	8.100.000	9.000.000	9.000.000	900.000
2.09.2.09.01.20.02.5 2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.263.000,00	-	-	-	-	-	-	1.178.000	85.000	1.263.000	1.263.000	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.09.2.09.01.20.02.5 .2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	-	-	-	-	-	-	120.000	-	120.000	120.000	-
2.09.2.09.01.20.02.5 .2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	2.250.000	-	2.250.000	2.250.000	-
2.09.2.09.01.20.02.5 .2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	-	-	-	-	-	-	5.400.000	2.700.000	8.100.000	8.100.000	-
2.09.2.09.01.20.02.5 .2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat-alat Bengkel	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000	19.800.000	19.800.000	200.000
2.09.2.09.01.20.02.5 .2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan komputer/PC	9.275.000,00	-	-	-	-	-	-	9.275.000	-	9.275.000	9.275.000	-
2.09.2.09.01.20.02.5 .2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	12.387.000,00	-	-	-	-	-	-	12.387.000	-	12.387.000	12.387.000	-
2.09.2.09.01.20.02.5 .2.3.12.11.	Belanja Modal Perangkat Lunak Sistem Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.01.20.02.5 .2.3.18.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan	386.675.000,00	-	-	-	-	368.500.000	368.500.000	-	-	-	368.500.000	18.175.000
2.09.2.09.01.20.03.	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	248.570.800,00	-	-	-	(122.000)	-	(122.000)	217.182.700	27.796.300	244.979.000	244.857.000	3.713.800
2.09.2.09.01.20.03.5 .2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	175.800.000,00	-	-	-	-	-	-	161.150.000	14.650.000	175.800.000	175.800.000	-
2.09.2.09.01.20.03.5 .2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	11.376.000,00	-	-	-	-	-	-	8.490.000	2.874.000	11.364.000	11.364.000	12.000
2.09.2.09.01.20.03.5 .2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.304.000,00	-	-	-	-	-	-	1.248.000	768.000	2.016.000	2.016.000	288.000
2.09.2.09.01.20.03.5 .2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	10.224.000,00	-	-	-	-	-	-	10.224.000	-	10.224.000	10.224.000	-
2.09.2.09.01.20.03.5 .2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	9.576.000,00	-	-	-	(122.000)	-	(122.000)	6.573.000	559.000	7.132.000	7.010.000	2.566.000
2.09.2.09.01.20.03.5 .2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	1.242.000,00	-	-	-	-	-	-	394.200	-	394.200	394.200	847.800
2.09.2.09.01.20.03.5 .2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	400.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	400.000	400.000	-

[illegible]

	JUMLAH	62.444.690.900,00	6.580.789.565	1.078.065.497	7.658.855.062	33.943.752.058	5.765.450.884	39.709.202.942	4.332.721.738	1.096.239.714	5.428.961.452	52.797.019.456	9.647.671.444
	Penerimaan :												
	- SP2D		6.580.789.565	1.078.764.837	7.659.554.402	33.945.737.428	5.765.450.884	39.711.188.312	4.657.396.274	875.325.464	5.532.721.738	52.903.464.452	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	576.711.918	303.886.553	880.598.471	86.181.608	45.310.746	131.492.354	1.012.090.825	
	b. PPh-21		172.392.300	39.508.725	211.901.025	-	-	-	31.650.431	12.383.380	44.033.811	255.934.836	
	c. PPh-22		-	-	-	12.392.446	6.468.750	18.861.196	21.938.574	2.011.661	23.950.235	42.811.431	
	d. PPh-23		-	-	-	87.884.698	4.438.618	92.323.316	8.189.312	8.292.902	16.482.214	108.805.530	
	e. PPh-Final					8.220.788	47.713.692	55.934.480	1.196.600	-	1.196.600	57.131.080	
	- Lain-lain					1.985.370	-	1.985.370	0	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan :		6.753.181.865	1.118.273.562	7.871.455.427	34.630.947.278	6.127.958.497	40.758.905.775	4.806.552.799	943.324.153	5.749.876.952	54.380.238.154	
	Pengeluaran :												
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)		6.580.789.565	1.078.065.497	7.658.855.062	33.943.752.058	5.765.450.884	39.709.202.942	4.332.721.738	1.096.239.714	5.428.961.452	52.797.019.456	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	576.711.918	303.886.553	880.598.471	86.181.608	45.310.746	131.492.354	1.012.090.825	
	b. PPh-21		172.392.300	39.508.725	211.901.025	-	-	-	31.650.431	12.383.380	44.033.811	255.934.836	
	c. PPh-22		-	-	-	12.392.446	6.468.750	18.861.196	21.938.574	2.011.661	23.950.235	42.811.431	
	d. PPh-23		-	-	-	87.884.698	4.438.618	92.323.316	8.189.312	8.292.902	16.482.214	108.805.530	
	e. PPh-Final					8.220.788	47.713.692	55.934.480	1.196.600	-	1.196.600	57.131.080	
	- Lain-lain		-	699.340	699.340	1.985.370	-	1.985.370	-	103.760.286	103.760.286	106.444.996	
	Jumlah Pengeluaran :		6.753.181.865	1.118.273.562	7.871.455.427	34.630.947.278	6.127.958.497	40.758.905.775	4.481.878.263	1.267.998.689	5.749.876.952	54.380.238.154	
	Saldo Kas :		-	-	-	-	-	-	324.674.536	(324.674.536)	-	-	

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

SUMBER, 31 Desember 2020
Bendahara Pengeluaran

H. DENNY SUPDIANA, SE.,M.Si.
NIP. 19620209 199003 1 004

SUMARTONO, SE.
NIP.19770323 200801 1 007

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
SASARAN STRATEGIS : KESATU

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

TUJUAN												
Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan												
INDIKATOR KINERJA TUJUAN												TARGET
Menurunkan Angka Kecelakaan												209 KECELAKAAN
SASARAN STRATEGIS												
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlau Lintas												
INDIKATOR KINERJA	TARGET											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75 V/C

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN											
		januari	Februari	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)												TOTAL ANGGARAN
			januari	Februari	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Rp -	Rp 105,419,500	Rp 82,875,000	Rp 72,151,000	Rp 3,895,009,610	Rp 250,702,440	Rp 161,999,450	Rp 126,603,260	Rp 168,354,660	Rp 472,518,991	Rp 54,168,800	Rp 8,810,972,089	Rp 14,200,774,800
Terpasangnya Rambu, Running tex, Warning light, RPPJ, Traffic light dan Cermin Cekung		Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rp -	Rp 13,032,000	Rp 6,462,000	Rp 9,702,000	Rp 6,478,740	Rp 4,319,370	Rp 90,739,880	Rp 64,980,190	Rp 119,571,590	Rp 8,829,400	Rp 7,368,800	Rp 375,225,830	Rp 706,709,800
Terpasangnya Marka Jalan, Zebra Cross,Zoss dan Paku Jalan		Pengadaan Marka Jalan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,800,000	Rp 1,100,000	Rp 506,100,000	Rp 510,000,000
Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan dan Delineator		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 2,300,000	Rp 265,000,000	Rp 267,300,000
Terpasangnya Penerangan Jalan Umum		Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (P.II.I)	Rp -	Rp 92,387,500	Rp 76,413,000	Rp 62,449,000	Rp 3,888,530,870	Rp 246,383,070	Rp 71,259,570	Rp 61,623,070	Rp 48,783,070	Rp 460,889,591	Rp 43,400,000	Rp 7,664,646,259	Rp 12,716,765,000
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Rp -	Rp 182,030,600	Rp 49,560,100	Rp 138,577,750	Rp 40,888,820	Rp 107,059,820	Rp 74,065,820	Rp 42,702,820	Rp 105,494,620	Rp 135,659,200	Rp 412,684,400	Rp 374,339,250	Rp 1,663,063,200

Tersedianya Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Rp	-	Rp	68,914,200	Rp	2,156,000	Rp	1,656,000	Rp	1,664,370	Rp	2,464,370	Rp	1,864,370	Rp	1,664,370	Rp	1,664,370	Rp	91,701,000	Rp	151,380,000	Rp	94,244,150	Rp	419,373,200
Tersedianya Dokumen Teknis Penataan Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon		Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Rp	-	Rp	9,871,200	Rp	8,911,100	Rp	71,536,750	Rp	10,075,790	Rp	9,688,790	Rp	33,052,790	Rp	4,052,790	Rp	5,582,790	Rp	4,032,000	Rp	146,868,400	Rp	144,423,600	Rp	448,096,000
Terlaksanakanya Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas	Rp	-	Rp	2,907,500	Rp	1,575,000	Rp	765,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	4,087,000	Rp	-	Rp	-	Rp	5,090,000	Rp	35,567,800	Rp	49,992,300
Jumlah Terminal Angkutan Darat yang dikelola dengn baik		Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Rp	-	Rp	63,586,000	Rp	28,237,000	Rp	28,137,000	Rp	27,529,290	Rp	27,529,290	Rp	29,029,290	Rp	27,529,290	Rp	31,654,290	Rp	29,239,000	Rp	35,000,000	Rp	43,213,550	Rp	370,684,000
Jumlah Petugas Parkir yang di bina		Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Rp	-	Rp	18,391,200	Rp	1,800,000	Rp	14,300,000	Rp	-	Rp	65,758,000	Rp	8,500,000	Rp	-	Rp	9,600,000	Rp	7,900,000	Rp	64,300,000	Rp	6,242,000	Rp	196,791,200
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pengendalian Analisis Dampak Lalu Lintas.		Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisa Dampak Lalu Lintas	Rp	-	Rp	18,360,500	Rp	6,881,000	Rp	22,183,000	Rp	1,619,370	Rp	1,619,370	Rp	1,619,370	Rp	5,369,370	Rp	8,919,370	Rp	1,611,000	Rp	10,046,000	Rp	49,898,150	Rp	128,126,500
Terselenggarakanya Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas		Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	48,073,800	Rp	1,176,200	Rp	-	Rp	750,000	Rp	50,000,000
JUMLAH			Rp	-	Rp	287,450,100	Rp	132,435,100	Rp	210,728,750	Rp	3,935,898,430	Rp	357,762,260	Rp	236,065,270	Rp	169,306,080	Rp	273,849,280	Rp	608,178,191	Rp	466,853,200	Rp	9,185,311,339	Rp	15,863,838,000

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
SASARAN STRATEGIS : KEDUA

TUJUAN												
Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan												
INDIKATOR KINERJA												TARGET
Menurunya Angka Kecelakaan												209 KECELAKAAN
SASARAN STRATEGIS												
Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan												
INDIKATOR KINERJA	TARGET											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	82.78	82.79	82.8	82.81	82.82	82.83	82.84	82.85	82.86	82.87	82.88	82.89 PROSEN

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN											
		januari	Februari	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Halte dan Terminal) yang layak fungsi	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Prosentase/jumlah pelanggaran lalu lintas	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)												TOTAL ANGGARAN
			januari	Februari	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 540,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 249,460,000	Rp 250,000,000
Tersedianya halte bus, halte BRT, taxi dan gedung terminal		Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 540,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 249,460,000	Rp 250,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Anokutan		Rp -	Rp 62,894,000	Rp 27,176,000	Rp 29,981,000	Rp 193,425,070	Rp 21,577,070	Rp 31,053,070	Rp 22,933,070	Rp 25,768,070	Rp 61,891,000	Rp 15,150,000	Rp 266,196,250	Rp 758,044,600
Penindakan Pidana ringan lalu lintas dan angkutan jalan		Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Rp -	Rp 17,662,000	Rp 5,147,000	Rp 15,482,000	Rp 8,293,740	Rp 4,888,740	Rp 6,538,740	Rp 3,238,740	Rp 5,713,740	Rp 14,062,000	Rp -	Rp 34,386,300	Rp 115,413,000
Tersedianya Database Pelayanan Jasa Angkutan		Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 85,093,600	Rp 85,093,600
Terselenggarakanya Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas		Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas	Rp -	Rp 36,224,000	Rp 18,569,000	Rp 14,499,000	Rp 185,131,330	Rp 16,688,330	Rp 15,764,330	Rp 19,694,330	Rp 18,114,330	Rp 47,829,000	Rp 13,350,000	Rp 144,136,350	Rp 530,000,000
Terkoordinasinya Penanganan Keselamatan Lalu lintas		Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi	Rp -	Rp 8,108,000	Rp 2,560,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,750,000	Rp -	Rp 1,940,000	Rp -	Rp 1,800,000	Rp 2,580,000	Rp 25,738,000
Tersedianya data base kecelakaan lalu lintas		Penyusunan Database Kecelakaan Transportasi	Rp -	Rp 900,000	Rp 900,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,800,000
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Rp -	Rp 5,966,000	Rp 160,000	Rp 4,826,000	Rp 170,000	Rp 2,280,000	Rp 392,987,300	Rp 2,762,000	Rp 95,740,000	Rp 1,061,000	Rp 961,000	Rp 32,646,700	Rp 539,560,000
Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor		Rehabilitasi/pemeli haraan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Rp -	Rp 380,000	Rp 160,000	Rp -	Rp 170,000	Rp -	Rp 460,000	Rp 710,000	Rp 95,360,000	Rp 700,000	Rp 600,000	Rp 1,440,000	Rp 99,980,000
Tersedianya balai uji yang representatif		Rehabilitasi/Pemeli haraan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp -	Rp 5,586,000	Rp -	Rp 4,826,000	Rp -	Rp 2,280,000	Rp 392,527,300	Rp 2,052,000	Rp 380,000	Rp 361,000	Rp 361,000	Rp 31,206,700	Rp 439,580,000

	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian		Rp	-	Rp	31,125,500	Rp	27,124,500	Rp	15,685,000	Rp	25,313,340	Rp	15,287,840	Rp	41,931,840	Rp	52,871,840	Rp	18,221,840	Rp	218,709,790	Rp	4,118,000	Rp	473,151,310	Rp	923,540,800
Tersedianya Gedung balai uji yang representatif		Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	16,527,000	Rp	600,000	Rp	-	Rp	199,900,790	Rp	-	Rp	7,972,210	Rp	225,000,000
Tersedianya Alat Uji dan Kelengkapan di Pengujian Kendaraan Bermotor		Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	870,000	Rp	30,640,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	418,460,000	Rp	449,970,000
Terlaksanakanya Pengujian Kendaraan Bermotor		Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Rp	-	Rp	31,125,500	Rp	27,124,500	Rp	15,685,000	Rp	25,313,340	Rp	15,287,840	Rp	24,534,840	Rp	21,631,840	Rp	18,221,840	Rp	18,809,000	Rp	4,118,000	Rp	46,719,100	Rp	248,570,800
JUMLAH			Rp	-	Rp	99,985,500	Rp	54,460,500	Rp	51,032,000	Rp	218,908,410	Rp	39,144,910	Rp	448,575,210	Rp	47,326,910	Rp	139,729,910	Rp	81,761,000	Rp	20,229,000	Rp	595,022,050	Rp	2,471,145,400

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN STRATEGIS : **KETIGA**

[illegible]

OUTPUT / KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)												TOTAL ANGGARAN
				januari	Februari	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 2,553,917,469	Rp 2,556,580,158	Rp 2,516,697,832	Rp 2,511,970,171	Rp 2,691,800,542	Rp 2,596,493,761	Rp 3,066,705,947	Rp 2,621,013,510	Rp 2,539,964,860	Rp 2,534,627,338	Rp 4,065,688,601	Rp 4,567,685,911	Rp 34,823,146,100
	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2,553,917,469	Rp 2,540,380,508	Rp 2,496,763,832	Rp 2,492,068,671	Rp 2,499,377,042	Rp 2,594,193,761	Rp 2,554,263,383	Rp 2,537,343,168	Rp 2,516,405,760	Rp 2,507,169,708	Rp 3,971,767,437	Rp 4,236,347,261	Rp 33,499,998,000
	Terpenuhinya jasa Perjinan KIR dan STNK		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Rp -	Rp 453,300	Rp 631,000	Rp -	Rp 2,853,600	Rp -	Rp 2,286,700	Rp -	Rp 4,270,200	Rp 898,900	Rp -	Rp 38,606,300	Rp 50,000,000
	Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp -	Rp 700,000	Rp 1,350,000	Rp 2,000,000	Rp 4,300,000	Rp -	Rp 1,000,000	Rp -	Rp 600,000	Rp 5,000,000	Rp -	Rp 6,187,500	Rp 21,137,500
	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 960,000	Rp 75,287,150	Rp -	Rp 900,000	Rp 864,000	Rp 1,033,150	Rp 79,044,300
	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 182,582,400	Rp 400,000	Rp 426,900,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,518,600	Rp 181,548,500	Rp 793,949,500
	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,396,400	Rp -	Rp 3,236,400	Rp 1,431,700	Rp -	Rp 1,928,400	Rp 14,992,900
	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 43,552,900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 26,773,200	Rp 49,749,800	Rp 120,075,900
	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 14,012,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 750,000	Rp 14,762,000
	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp -	Rp 4,624,500	Rp 16,108,000	Rp 2,683,000	Rp 2,687,500	Rp -	Rp 6,496,500	Rp 2,452,500	Rp 5,779,500	Rp 8,558,500	Rp 41,055,000	Rp 29,555,000	Rp 120,000,000
	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu Dinas		Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp -	Rp 4,720,000	Rp -	Rp 4,720,000	Rp -	Rp 1,900,000	Rp 1,900,000	Rp 1,900,000	Rp 1,900,000	Rp 1,900,000	Rp 980,000	Rp 980,000	Rp 20,900,000
	Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp -	Rp 5,701,850	Rp 1,845,000	Rp 10,498,500	Rp -	Rp -	Rp 6,938,064	Rp 4,030,692	Rp 7,773,000	Rp 8,768,530	Rp 21,730,364	Rp 21,000,000	Rp 88,286,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp -	Rp 41,260,100	Rp 23,525,100	Rp 23,799,000	Rp 20,873,250	Rp 20,873,250	Rp 90,681,250	Rp 20,873,250	Rp 35,693,250	Rp 32,016,500	Rp 82,949,400	Rp 26,233,250	Rp 418,777,600
	Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor yang representatif		Pembangunan Gedung Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 49,090,000	Rp 910,000	Rp 50,000,000
	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp -	Rp 29,260,100	Rp 14,475,100	Rp 14,299,000	Rp 14,373,250	Rp 14,373,250	Rp 33,181,250	Rp 14,373,250	Rp 29,193,250	Rp 24,016,500	Rp 26,659,400	Rp 14,373,250	Rp 228,577,600
	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp -	Rp 12,000,000	Rp 9,050,000	Rp 9,500,000	Rp 6,500,000	Rp 6,500,000	Rp 9,500,000	Rp 6,500,000	Rp 6,500,000	Rp 8,000,000	Rp 6,500,000	Rp 9,650,000	Rp 90,200,000
	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 48,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 700,000	Rp 1,300,000	Rp 50,000,000

		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	71,185,000	Rp	108,815,000	Rp	-	Rp	180,000,000						
	Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan Pegawai		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	71,185,000	Rp	108,815,000			Rp	180,000,000						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan		Rp	-	Rp	16,204,000	Rp	17,020,000	Rp	25,426,000	Rp	8,035,850	Rp	8,035,850	Rp	18,723,850	Rp	12,435,850	Rp	8,035,850	Rp	18,762,000	Rp	9,458,000	Rp	44,255,550	Rp	186,392,800
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	-	Rp	-	Rp	9,026,000	Rp	12,004,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	9,458,000	Rp	-	Rp	30,488,000
	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	7,400,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	7,600,000	Rp	15,000,000
	Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	-	Rp	6,376,000	Rp	3,161,000	Rp	3,161,000	Rp	3,177,740	Rp	3,177,740	Rp	3,177,740	Rp	3,177,740	Rp	3,177,740	Rp	9,841,000	Rp	-	Rp	11,682,300	Rp	50,110,000
	Terlaksanakanya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp	-	Rp	9,828,000	Rp	4,833,000	Rp	10,261,000	Rp	4,858,110	Rp	4,858,110	Rp	8,146,110	Rp	9,258,110	Rp	4,858,110	Rp	8,921,000	Rp	-	Rp	24,973,250	Rp	90,794,800
		Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral		Rp	-	Rp	6,376,000	Rp	3,161,000	Rp	3,161,000	Rp	3,177,740	Rp	3,177,740	Rp	3,177,740	Rp	3,177,740	Rp	13,285,740	Rp	3,161,000	Rp	18,493,000	Rp	19,270,300	Rp	79,619,000
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Sektoral		Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	Rp	-	Rp	6,376,000	Rp	3,161,000	Rp	3,161,000	Rp	3,177,740	Rp	3,177,740	Rp	3,177,740	Rp	3,177,740	Rp	13,285,740	Rp	3,161,000	Rp	18,493,000	Rp	19,270,300	Rp	79,619,000
JUMLAH				Rp	2,553,917,469	Rp	2,620,420,258	Rp	2,560,403,932	Rp	2,564,356,171	Rp	2,723,887,382	Rp	2,628,580,601	Rp	3,179,288,787	Rp	2,657,500,350	Rp	2,596,979,700	Rp	2,659,751,838	Rp	4,285,404,001	Rp	4,657,445,011	Rp	35,687,935,500

Sumber, Oktober 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

H.DENNY SUPDIANA, SE.,M.Si.
NIP. 19620209 199003 1 004